



# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL HAM

TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan baik dan tepat waktu. Laporan kinerja disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan sebagai kontrol atas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan anggaran pada kurun waktu tahun berjalan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum

dan HAM M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Direktorat Jenderal HAM sebagai salah satu dari 11 Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Selain itu, langkah-langkah strategis yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja, kendala selama pelaksanaan serta tindak lanjut yang dilakukan juga disampaikan dalam laporan kinerja ini.

Terimakasih atas kontribusi dari semua pihak dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal HAM Tahun 2023 ini, diharapkan dengan disusunnya laporan ini kinerja yang telah dilaksanakan dapat terukur dengan baik, transparan dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerjanya untuk hasil yang maksimal pada akhir tahun anggaran.

Jakarta, Desember 2023

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia,

DR. DHAHANA PUTRA



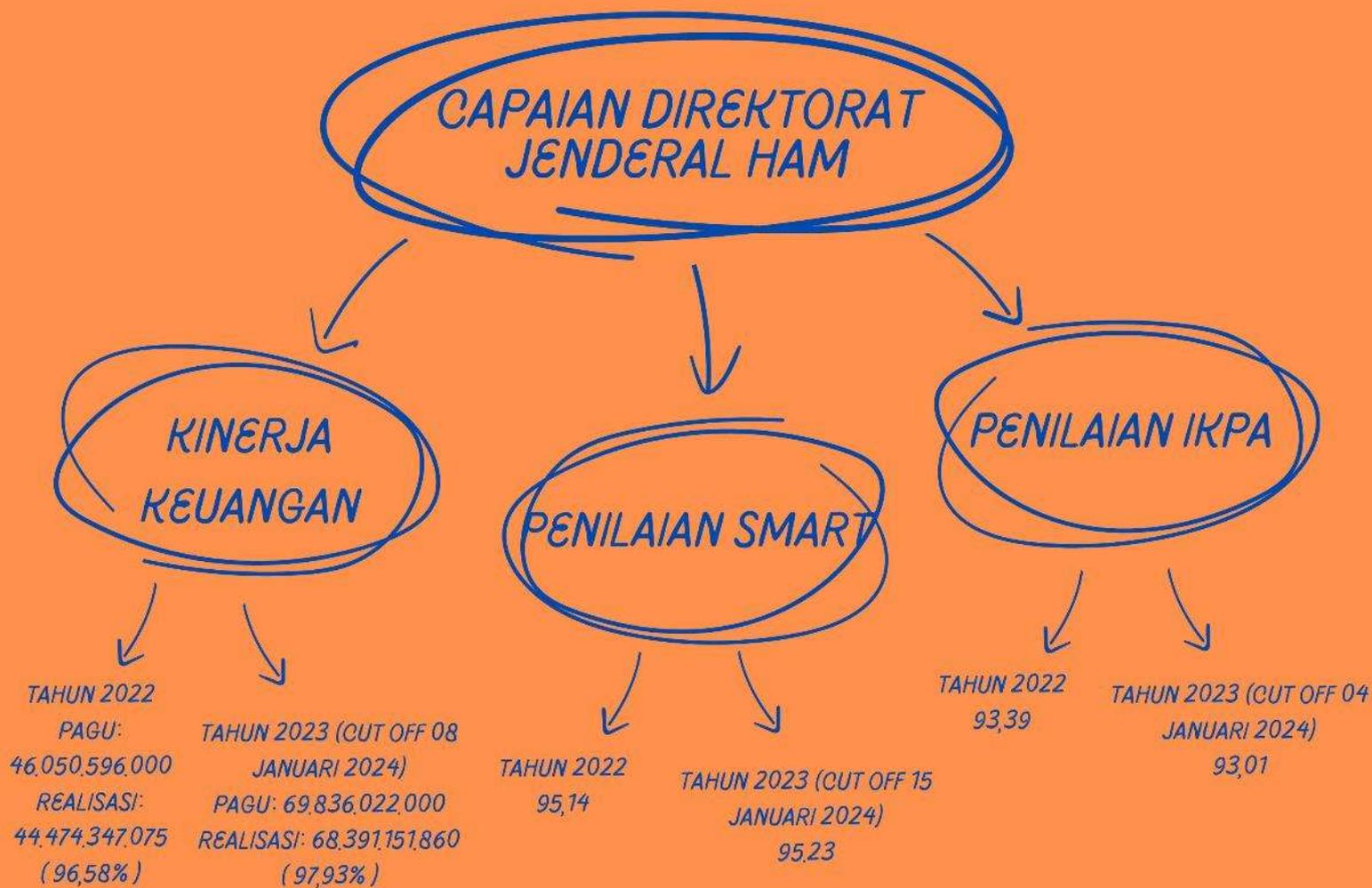
# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal HAM Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2023, yang terdiri dari:

**2 Indikator  
Kinerja  
Sasaran**

**3 Indikator  
Kinerja  
Program**





Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengampu dua program yaitu Program Pemajuan dan Penegakan HAM serta Program Dukungan Manajemen, dengan pagu awal sebesar Rp 41.980.498.000,- kemudian berdasarkan Petikan DIPA Revisi ke 05 tanggal 26 Juni 2023 dengan nomor seri DS:8449-5409-3389-9390, Direktorat Jenderal HAM mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja sarana dan prasarana pada program Dukungan Manajemen di Direktorat Jenderal HAM sebesar Rp 17.956.046.000,- dan mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kembali berdasarkan Petikan DIPA Revisi ke 08 tanggal 13 Oktober 2023 dengan nomor seri DS:7897-3585-6052-6505 sebesar Rp. 1.267.737.000,- sehingga pagu Ditjen HAM Tahun 2023 sebesar Rp 61.204.281.000,-. Dan total pagu termasuk Bidang HAM Kantor Wilayah adalah sebesar Rp. 69.836.022.000,-. Sampai dengan tanggal 08 Januari 2024 terealisasi sebesar Rp 68.391.151.860,- atau sebesar 97,93%. Anggaran digunakan untuk melaksanakan target prioritas nasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Pencapaian target tersebut juga sejalan

dengan target-target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal HAM Tahun 2023 beserta indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, sehingga menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75%	92,28%	123,04%	1.612.479.376 (98,82%) (Cut off 08 Januari 2024)
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45%	76,44%	169,86%	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%	52%	208%	198.401.820 (98,61%) (Cut off 08 Januari 2024)
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku	50%	63,8%	127,6 %	963.928.739 (97,24%) (Cut off 08 Januari 2024)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)
		kepentingan				
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	82,18%	109,57%	1.022.505.635 (98,04 %) (Cut off 08 Januari 2024)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	1.Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	82,18%	109,57%	1.022.505.635 (98,04 %) (Cut off 08 Januari 2024)
2.	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	1.Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	100%	100%	100%	782.262.636 (98,48%) (cut off 08 Januari 2024)
3.	Meningkatnya kerja sama HAM	1.Persentase kerja sama HAM yang	100%	100%	100%	471.852.976 (92,60%)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang ditindaklanjuti	ditindaklanjuti				(Cut off 08 Januari 2024)
4.	Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	1. Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	70%	81,72%	116,74%	1.612.479.376 (98,82%) (Cut off 08 Januari 2024)
5.	Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%	52%	208%	198.401.820 (98,61%) (Cut off 08 Januari 2024)
6.	Tersedianya strategi Nasional Bisnis dan HAM	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	137.153.220 (99,15%) (Cut off 08 Januari 2024)
7.	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	63,8%	127,6%	963.928.739 (97,24%) (Cut off 08 Januari 2024)
8.	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1. Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1.099.513.196 (94,68%) (Cut off 08 Januari 2024)
9.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	109 Instansi Pemerintah	396 Instansi Pemerintah	363,3%	1.243.072.479 (98,63%) (Cut off 08 Januari 2024)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	program aksi HAM	2. Jumlah kab/kota peduli HAM	57 Instansi Pemerintah	267 Instansi Pemerintah	468,42%	2.073.600.265 (99,61%) (Cut off 08 Januari 2024)
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	33 Instansi Pemerintah	240 Instansi Pemerintah	727,27%	4.650.321.846 (99,03%) (Cut off 08 Januari 2024)
10.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	99 Rekomendasi	188 Rekomendasi	189,89%	581.251.109 (97,84%) (Cut off 08 Januari 2024)
11.	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	1. Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%	217.182.025 (97,31%) (Cut off 08 Januari 2024)
12.	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100%	30.856.418.908 (97,05%) (Cut off 08 Januari 2024)
2. Jumlah Layanan Internal		1 Layanan	1 Layanan	100%	1.477.683.415 (91,62%) (Cut off 08 Januari 2024)	
3. Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	100%	18.827.489.705 (99,72%) (Cut off 08 Januari 2024)	

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	9
Daftar Tabel	10
Daftar Grafik	11
Daftar Gambar	12
Bab I Pendahuluan	14
I.1 Latar Belakang	14
I.2. Tusi dan Struktur Organisasi	14
I.3. Maksud dan Tujuan	16
I.4. Aspek Strategis	16
I.5. Isu Strategis	17
I.6. Sistematika Laporan	25
Bab II Perencanaan Kinerja	27
II.1. Rencana Startegis	27
II.2. Perjanjian Kinerja	33
Bab III Akuntabilitas Kinerja	37
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	37
III.2. Realisasi Anggaran	141
III.3. Capaian Kinerja Anggaran	142
III.4. Capaian Kinerja Lainnya	143
Bab IV Penutup	162
IV.1. Kesimpulan	162
IV.2. Saran	164

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sasaran Strategis Ditjen HAM (IKU Kementerian)	37
Tabel 3.2	Capaian Target Sasaran Program Ditjen HAM (IKU Ditjen HAM)	38
Tabel 3.3	Capaian Target Sasaran Kegiatan Ditjen HAM	39
Tabel 3.4	Capaian Target dan Realisasi IKU Ditjen HAM Tahun 2023	44
Tabel 3.5	Daftar Kementerian/Lembaga yang Konsisten Berpartisipasi dan Mendapatkan Nilai Maksimal	46
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Ditjen HAM tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	47
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Target IKU Ditjen HAM tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	48
Tabel 3.8	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ditjen HAM Tahun 2023	52
Tabel 3.9	Tindak Lanjut Komunikasi berdasarkan Locus Dugaan Pelanggaran HAM	55
Tabel 3.10	Daftar Unit Kerja yang telah menindaklanjuti Hasil Diskuat HAM dalam bentuk P2HAM pada Semester I Tahun 2023	59
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	63
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Program Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	64
Tabel 3.13	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	73
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	75
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	76
Tabel 3.16	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	79
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	81
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	82
Tabel 3.19	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	85
Tabel 3.20	Daftar Kerja Sama yang ditindaklanjuti Ditjen HAM Tahun 2023	86
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	87
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	88
Tabel 3.23	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	90
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	91
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	91
Tabel 3.26	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	94
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	95
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	96
Tabel 3.29	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	99
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	101

	dengan Tahun Sebelumnya	
Tabel 3.31	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	103
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	105
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	106
Tabel 3.34	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	109
Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	111
Tabel 3.36	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	112
Tabel 3.37	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	115
Tabel 3.38	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	117
Tabel 3.39	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	119
Tabel 3.40	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	125
Tabel 3.41	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	126
Tabel 3.42	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	127
Tabel 3.43	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	129
Tabel 3.44	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	133
Tabel 3.45	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	133
Tabel 3.46	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023	136
Tabel 3.47	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	137
Tabel 3.48	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	139
Tabel 3.49	Realisasi Anggaran Direktorat Jendral HAM Tahun 2023	141
Tabel 3.50	Persentase Capaian Per Triwulan Rencana Kerja Pemerintah Prioritas Nasional Direktorat Jenderal HAM Tahun 2023	152

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Matriks 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, (Bappenas, 2019)	29
Grafik 3.1	Tindak Lanjut Komunikasi berdasarkan Locus Dugaan Pelanggaran HAM	104
Grafik 3.2	Perbandingan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran HAM	106
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal HAM Tahun 2022-2023	141

## DAFTAR

# GAMBAR

Gambar 3.1	Workshop Pengarusutamaan HAM dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana	87
Gambar 3.2	Peluncuran Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Graha Pengayoman, Jakarta	100
Gambar 3.3	Dialog bersama perwakilan eks mahid	110
Gambar 3.4	Pelaksanaan kegiatan workshop e-Monev Bappenas di Hotel Alana Sentul	151
Gambar 3.5	Penyerahan simbolik pemulihan hak peristiwa pelanggaran HAM yang berat	154
Gambar 3.6	Delegasi Pemerintah RI dalam The 12th United Nations Forum on Business and Human Rights	155
Gambar 3.7	Pemberian Layanan Keimigrasian bagi korban dugaan pelanggaran HAM Berat di Luar Negeri	156
Gambar 3.8	Kegiatan Diseminasi Pemahaman Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia bagi pelajar SMA/Sederajat tahun 2023	158
Gambar 3.9	Pelatihan Mediator dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Bagi Direktorat Jenderal HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	161



**DJHAM**

# **BAB I PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**  
**Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Aspek Strategis**  
**Isu Strategis**  
**Sistematika Laporan**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Hormatis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**



**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab IX Pasal 290, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait dengan perencanaan strategis Tahun 2020-2024 mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia serta kegiatan strategis masing-masing Direktorat yang disertai dengan kerangka kelembagaan dan pendanaannya, telah tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-04.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

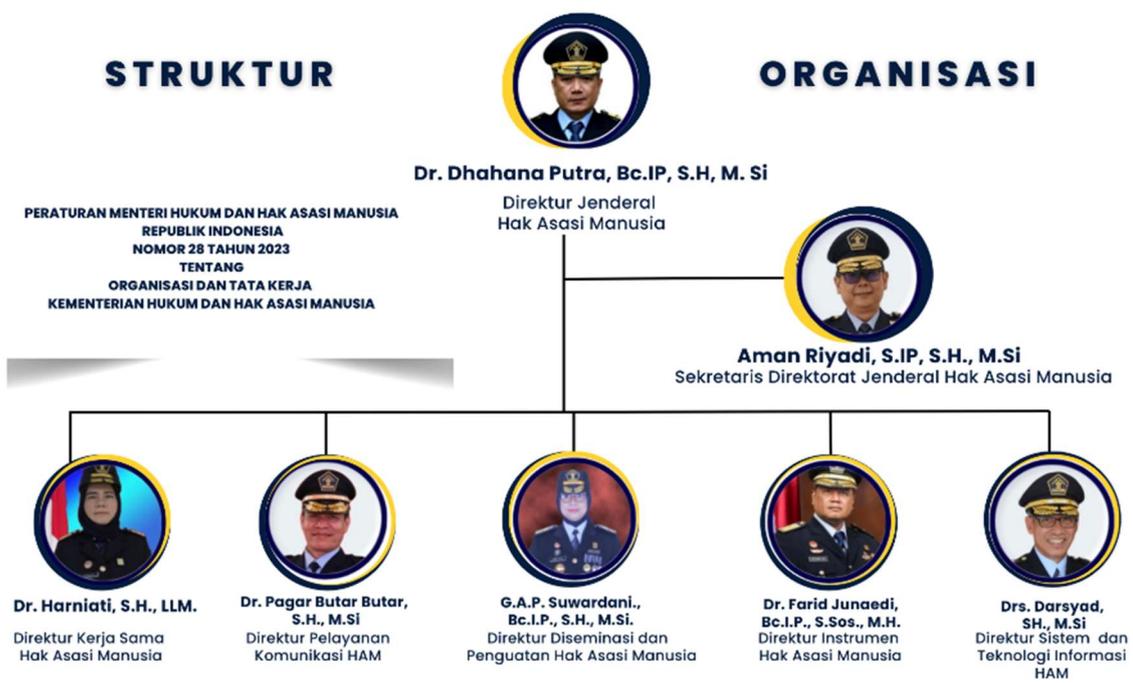
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pada tahun berjalan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2023. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai alat kontrol Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar dapat meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik lagi pada akhir tahun anggaran.

### **I.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal HAM;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia



### I.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2023 ini yaitu sebagai media informasi capaian kinerja Direktorat Jenderal HAM selama Tahun 2023, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kinerja yang berkesinambungan bagi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

### I.4. Aspek Strategis

Nilai-nilai HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa **penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM** atau yang disingkat P5HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Merujuk pada landasan tersebut, Kementerian Hukum Dan HAM RI yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menteri Hukum dan HAM melalui pasal 290 Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, secara khusus menugaskan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (DJHAM) untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal HAM memiliki aspek strategis keberadaan Direktorat Jenderal HAM antara lain penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait **penghormatan dan perlindungan HAM** berupa *social protection* untuk setiap warga negara

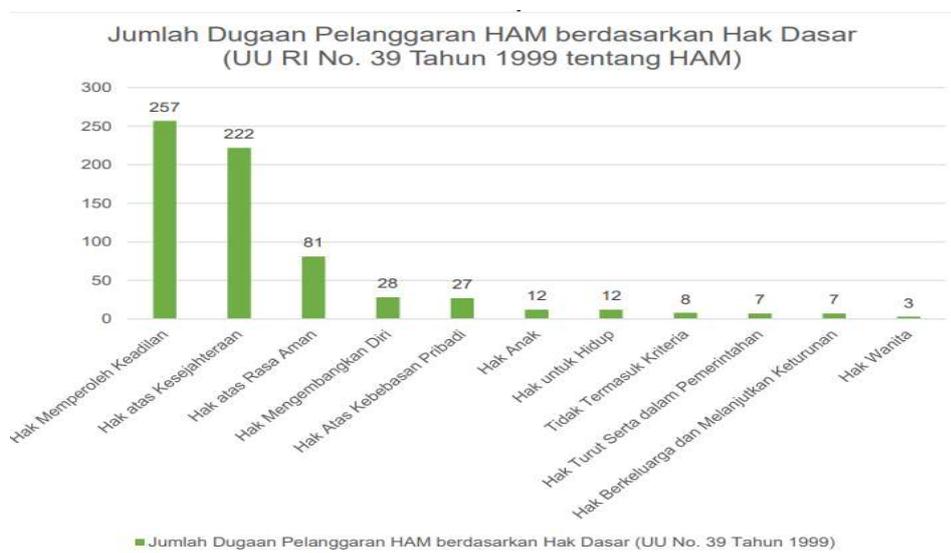
terutama kelompok rentan (Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat) dan bisnis dan HAM untuk kalangan pelaku usaha, asosiasi dan masyarakat/pekerja. Terkait **pemenuhan HAM** untuk masyarakat berupa aspek fasilitasi akses dan penyediaan informasi HAM. Terkait **penegakan HAM** berupa penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diajukan maupun yang tidak diajukan dan juga penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial. Selanjutnya terkait **pemajuan HAM** berupa pemantauan atas upaya pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan dan layanan pendidikan.

## I.5. Isu Strategis

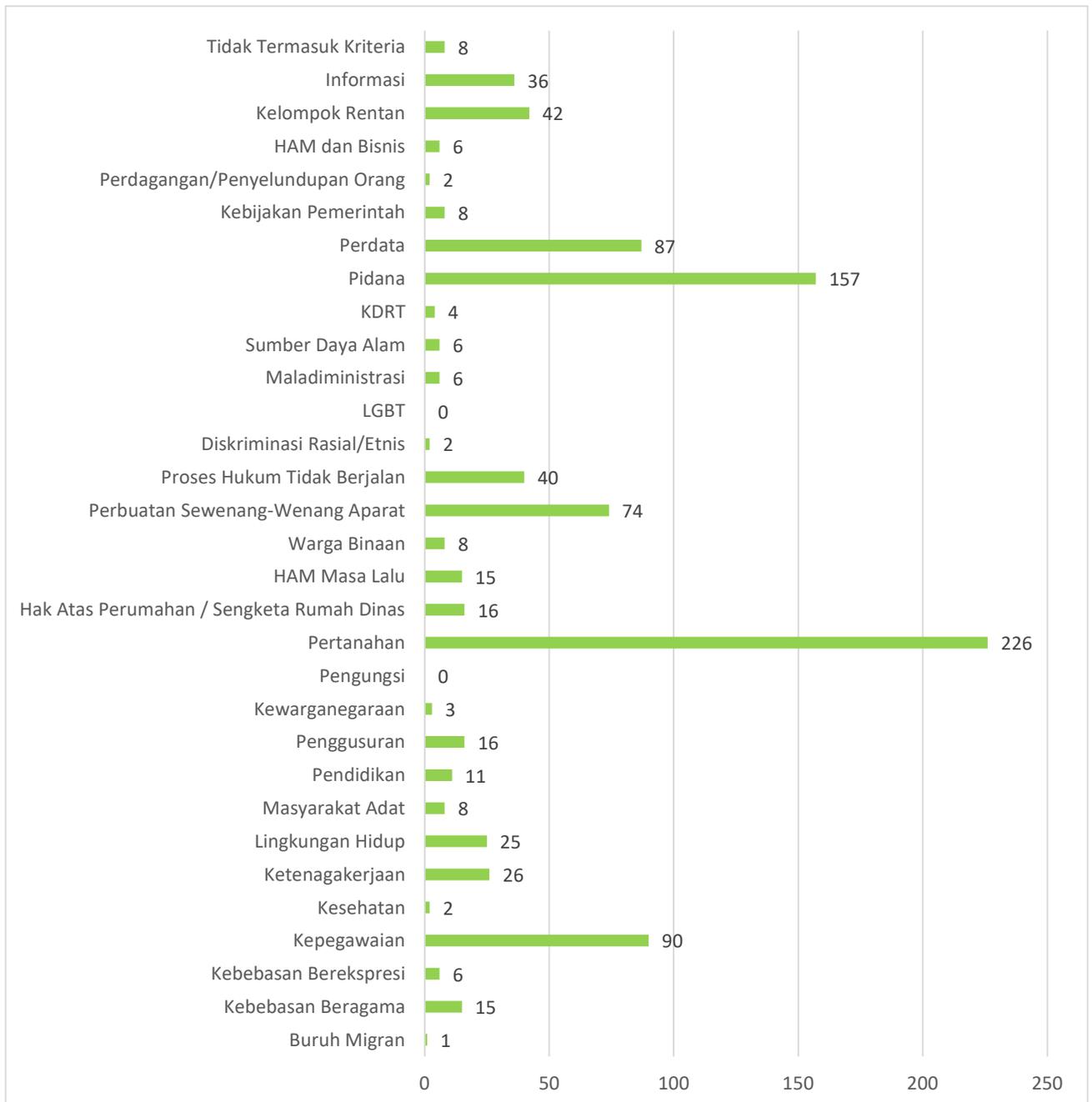
Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya untuk mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM, sesuai hasil evaluasi dan perkembangan kondisi di masyarakat pada pelaksanaan pencapaian kegiatan di Tahun 2023, *Strategic Issued* (Isu Strategis) yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia adalah:

### ❖ Pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria

Isu dugaan pelanggaran HAM dalam konflik agraria dipilih menjadi isu strategis berangkat dari beberapa kondisi faktual. Pertama, banyaknya pengaduan permasalahan agraria yang masuk ke Ditjen HAM setiap tahunnya. Kedua, Tata kelola agraria yang kurang transparan, mengakibatkan potensi pelanggaran HAM, Ketiga, kompleksitas konflik agraria yang berpengaruh kepada pelanggaran HAM yang lain;



Dari data di atas dapat dilihat jumlah pengaduan masyarakat pada bulan Januari-Desember 2023 menunjukkan bahwa hak memperoleh keadilan (349 kasus), Hak atas kesejahteraan (325 kasus) dan hak atas rasa aman (111 kasus) adalah beberapa sebaran kategori 10 hak dasar yang paling banyak diadukan.



Dari data di atas terlihat data pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal HAM mayoritas terkait dengan isu pertanahan (226 kasus), Pidana (157 kasus), dan Kepegawaian (90 kasus) menjadi tematik dugaan pelanggaran HAM yang tertinggi pada bulan Januari-Desember 2023.

❖ **Peraturan perundangan-undangan yang belum berperspektif HAM**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan analisis produk hukum daerah, yang melibatkan Kementerian/Lembaga/Daerah yang terkait. Sebagai pelaksanaan mandat UU HAM untuk mengambil “langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain. Ditjen HAM mengeluarkan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 tentang Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan ini untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dalam penyusunan kebijakan yang dihasilkan oleh DJHAM baik di tingkat Pusat maupun Daerah belum mempunyai efek atau dampak kepada kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Dampaknya terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan juga turut mempengaruhi hubungan sosial maupun legal antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini kerap timbul pertentangan atau kontestasi antara apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan masyarakat tidak jarang kondisi ini yang menyebabkan kebijakan menjadi tidak tepat bagi kebutuhan masyarakat;

❖ **Kurangnya pemahaman tentang HAM pada Masyarakat**

Masih tingginya kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu indikasi kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak asasi manusia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal HAM yang memiliki fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Diseminasi dan Penguatan HAM telah menyiapkan grand desain secara menyeluruh untuk mendiseminasikan nilai-nilai HAM kepada Masyarakat. Selanjutnya tindak lanjutnya adalah kegiatan diseminasi HAM untuk memberikan pemahaman terkait prinsip dasar HAM, kelompok hak, tanggung jawab negara, pembatasan HAM

serta instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Selain itu disajikan materi muatan HAM yang terbagi kedalam 4 tematik isu HAM berdasarkan rekapitulasi laporan tahunan dugaan pelanggaran HAM pada Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat;

❖ **Capaian Aksi HAM yang belum dirasakan oleh Masyarakat**

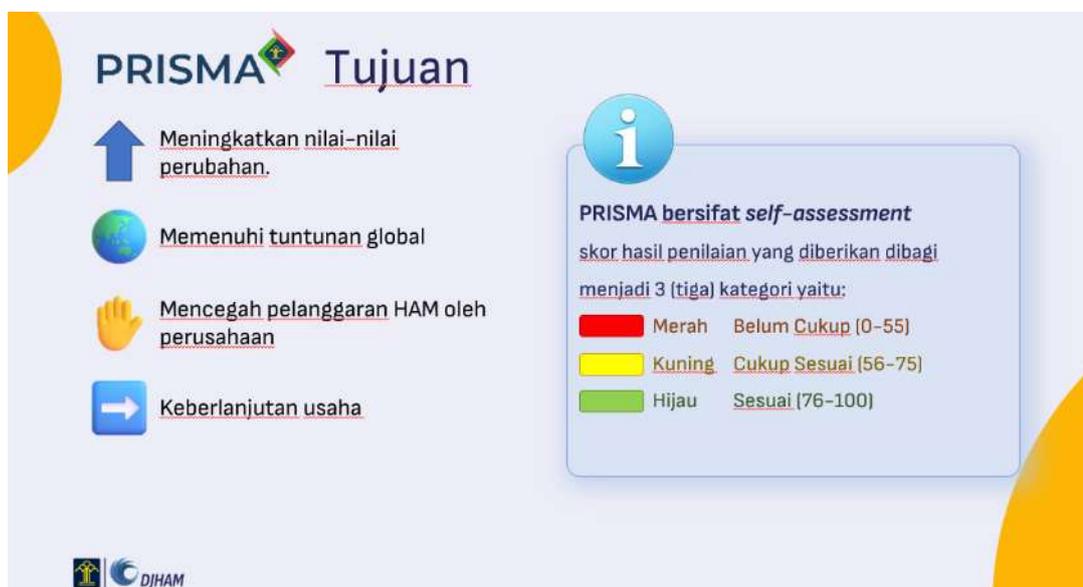
Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan cetak biru Pemerintah Pusat dan Daerah dalam aktivitas Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, perlindungan dan Penegakan HAM di luar rutinitas atau program kerja lembaga. Penilaian Aksi HAM selama ini diukur melalui aspek administrasi dan substansi pada laporan untuk memastikan RANHAM telah tepat tertuju pada kelompok sasaran. Periode RANHAM akan berakhir pada tahun 2024, untuk itu perlu disusun Rencana Aksi yang dapat meningkatkan dampak dan jangkauan langsung kepada sasaran, dituntut komitmen dari seluruh pimpinan Pusat dan Daerah agar dapat melaksanakan dan melaporkan capaian Aksi HAM;

Dalam pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM Generasi-V, kendala yang dihadapi oleh:

- 1). Pemda sebagai pelaksana kegiatan, dalam pelaporan RANHAM masih bersifat administratif belum berupa *outcome*, pemahaman terhadap substansi Aksi HAM masih minim sehingga mayoritas Pemda hanya menyampaikan pelaporan berbasis administrasi, dan tidak semua Pemda memiliki nomenklatur HAM di organisasinya sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan penganggaran RANHAM. Aksi HAM masih merupakan program rutin institusi pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- 2). Panitia Nasional RANHAM, memiliki kendala bahwa verifikasi yang dilakukan oleh panitia nasional masih berdasarkan dokumen pelaporan dari K/L/D, sehingga diperlukan verifikasi faktual kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) dari RANHAM. Belum optimalnya sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksi HAM dimana pelaporannya masih sebatas administrasi prosedural.

❖ **Meningkatkan jumlah pelaku usaha untuk mengikuti penilaian mandiri melalui PRISMA**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis Dan HAM di Indonesia diperlukan Upaya yang terintegrasi oleh seluruh pihak bukan hanya pemerintah, tapi dari pelaku usaha, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menghormati dan melindungi HAM dari aktivitas bisnis. Upaya pemerintah Indonesia telah jelas dalam meningkatkan pemahaman, membangun sinergitas dan pemulihan. Sebagai Upaya pencegahan dan mitigasi untuk pelaku usaha, Ditjen HAM telah meluncurkan aplikasi PRISMA (penilaian risiko bisnis dan HAM) untuk membantu Perusahaan menganalisis risiko dampak HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis;



❖ **Pelaksanaan Penguatan dan Koordinasi Pelanggaran HAM Berat (PHB) masa lalu**

Penguatan dan Koordinasi Pelanggaran HAM Berat (PHB) Masa Lalu adalah bentuk konsistensi dan komitmen pemerintah terhadap upaya penyelesaian PHB, adalah dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial PHB pada tanggal 15 Maret 2023. Sehubungan dengan Inpres tersebut Direktorat Jenderal HAM sebagai anggota Tim

Pelaksana telah melakukan diskusi publik dalam rangka evaluasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah, akademisi, aktivis, dan unsur masyarakat lainnya. Berdasarkan diskusi publik diperoleh rekomendasi sebagai berikut :

- Pemerintah perlu memberikan penekanan pada pengungkapan kebenaran dan pelurusan sejarah, karena tidak mungkin ada pemulihan korban apabila tidak didukung dengan pengungkapan kebenaran maupun pelurusan sejarah atas peristiwa PHB; dan
- Pemerintah perlu untuk melakukan verifikasi data bagi korban-korban yang belum terdaftar dan belum menerima pemulihan.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ;
- Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pada tanggal 11 Agustus 2023;
- Menyelenggarakan audiensi virtual dengan eks MAHID di Swedia an. Tom Iljas pada tanggal 26 April 2023;
- Menyelenggarakan dialog dengan eks MAHID (Mahasiswa Ikatan Dinas Indonesia) di Belanda dan Ceko pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2023; dan
- Pemberian Prioritas Layanan Keimigrasian kepada 16 orang eks MAHID pada 10 Oktober 2023.

#### ❖ **Implementasi Rancangan Meta Data dan Uji Coba Alat Ukur Indeks HAM**

Indeks HAM dalam keseluruhan pencapaian sudah dilaksanakan sesuai proses bisnis penyusunan indeks HAM di tahun 2023 yang mengacu pada dua sasaran yaitu implemementasi Rancangan Metadata dan Uji Coba Alat Ukur Indeks HAM. Adapun tahapan yang sudah dilakukan adalah :

- Indikator Indeks HAM terdiri dari dua Dimensi yaitu Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang terdiri dari 20 indikator dan 135 variabel;
- Pengumpulan data telah dilaksanakan dengan metode wawancara pakar (16 orang). Survey masyarakat bekerja sama dengan Lembaga Demografi \_Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD\_FEB UI) yang dilakukan di 34 propinsi dengan hasil 1551 responden, kajian literatur/administratif dari 44 Kementerian/Lembaga; dan
- Telah dilaksanakan uji Fungsi Alat ukur (uji coba Indeks HAM Indonesia) melalui proses penghitungan dan penyusunan analisis;

Indeks HAM Indonesia menghasilkan tiga kategori hasil pengukuran, yaitu :

- Kategori hasil 1 : Kondisi Implementasi HAM Sudah BAIK (sesuai instrumen HAM Nasional);
- Kategor hasil 2 : Kondisi Implementasi HAM Cukup BAIK (memerlukan penguatan lebih lanjut); dan
- Kategori hasil 3 : Kondisi Implementasi HAM Memerlukan Perhatian Khusus sehingga diperlukan langkah penanganan prioritas agar sesuai dengan standar yang diatur dalam instrumen HAM.

Prioritas penanganan Indeks HAM yaitu:

- memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan yaitu antara lain dengan perbaikan Indeks Ketahanan Pangan dan kenaikan persentase desa yang memiliki strategi kemandirian pangan;
- Diperlukan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam penikmatan dan pemanfaatan tanah adat antara lain dengan melakukan upaya untuk memastikan pencapaian penetapan hutan adat;
- Memastikan pelaksanaan instrumen hukum dalam menjamin hak atas *privacy*, terkait dengan kerahasiaan data pribadi serta jaminan *privacy* dalam komunikasi melalui sarana elektronik;

- Pembentukan mekanisme penanganan dan pemulihan pelanggaran hak atas *privacy* utamanya kebocoran data pribadi;
- Memastikan pelaksanaan instrumen hukum dalam menjamin hak atas keamanan pribadi; dan
- Memastikan penanganan terkait ancaman keamanan oleh masyarakat terutama kelompok rentan.

#### ❖ **Terbentuknya Pos Pengaduan HAM di Wilayah**

Dalam pelaksanaan pelayanan penanganan dugaan pelanggaran HAM telah dibentuk sebanyak 1.046 pos pengaduan HAM dengan rincian sebagai berikut: 1). 747 Pos Yankomas di UPT Kemenkumham seluruh Indonesia; 2). 121 Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Pos Yankumhamdes) pada 57 Kecamatan di 9 Kab/Kota di Provinsi Bali; 3). 88 Pos Yankomas di gereja yang berada di 33 Klasis Wilayah pelayanan gereja Kristen Injili di Tanah Papua; 4). 50 Pos Yankomas di Denominasi gereja di Papua Barat; dan 5). 40 Pos Pengaduan HAM di kecamatan-kecamatan di 3 kabupaten di Provinsi Bangka Belitung.

#### ❖ **Kontribusi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB**

Dalam pelaksanaan *Universal periodic review*, Indonesia telah mengikuti sidang review UPR putaran ke-4 pada tanggal 9-11 November 2022. Pada saat itu Indonesia menerima 269 rekomendasi dari 108 negara anggota Dewan HAM PBB. Melalui proses dialog dan konsultasi publik dengan *meaningful participation* berbagai pemangku kepentingan, Indonesia telah memutuskan untuk mendukung (*support*) 205 rekomendasi, memberi dukungan parsial (*partially support*) 5 rekomendasi, dan mencatat (*take note*) 59 rekomendasi.

## I.6. Sistematika Laporan

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan menyesuaikan dengan Kepmenkumham Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



<b>Kata Pengantar</b>	Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	Ringkasan mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja
<b>Bab I Pendahuluan</b>	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( <i>strategic issues</i> ) yang sedang dihadapi organisasi
<b>Bab II Perencanaan</b>	Pada bab ini diuraikan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	<p>Pada bab ini diuraikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Kinerja Organisasi, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai penjelasan dan analisis yang telah dihasilkan organisasi.</li> <li>- Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</li> <li>- Capaian Kinerja Anggaran Pada subbab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran dihasilkan dari 2 variabel, yaitu nilai SMART DJA dan nilai IKPA</li> <li>- Capaian Kinerja Lainnya Pada subbab ini dijelaskan diuraikan kinerja lainnya Ditjen HAM pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, dan capaian lainnya (diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU))</li> </ul>
<b>Bab IV Penutup</b>	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



**DJHAM**

# **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

## **Rencana Strategis Perjanjian Kinerja**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



**SEMAKIN  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**



**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **II.1. Rencana Strategis**

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia kembali merumuskan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan program yang mengakibatkan pergeseran Program Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada upaya-upaya peningkatan program/kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah yang memenuhi prinsip P5HAM, Peningkatan efektifitas penanganan pengaduan pelanggaran HAM, Pembangunan sistem data dan informasi pemajuan HAM yang terintegrasi dan Peningkatan akuntabilitas kelembagaan serta SDM yang efektif dan adaptif serta Peningkatan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di seluruh aspek bidang pembangunan.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas

sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil nyata. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke

- kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
  4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
  5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Grafik 2.1. Matriks 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, (Bappenas, 2019)**



Sebagai bagian dari pemerintah, untuk mendukung terwujudnya Visi, pelaksanaan Misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil**

## **Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'."**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, yaitu *"penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya"*, misi nomor 7, yaitu: *"perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara"*, dan misi nomor 8, yaitu: *"pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya"*. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengemban Misi nomor 4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu: *"Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan"*. Untuk melaksanakan Misi tersebut, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menerjemahkannya ke dalam Visi Direktorat Jenderal HAM, yaitu:

*"Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan untuk mencapai Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong"*

Untuk mencapai Visi yang dimaksud di atas, Direktorat Jenderal HAM menetapkan Misi Direktorat Jenderal, sebagai berikut:

1. Mendukung upaya penyelesaian dugaan pelanggaran/ permasalahan hak asasi manusia;
2. Menciptakan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang memahami, mengetahui, dan memiliki kesadaran terhadap P5HAM.
3. Mewujudkan komitmen HAM Pemerintah Indonesia di tingkat global, nasional, dan lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui akuntabilitas pelaksanaan P5HAM.

Berdasarkan misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif), maka tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 adalah terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia, meliputi:

1. Misi: Mendukung upaya penyelesaian dugaan pelanggaran/ permasalahan hak asasi manusia, mencakup:
  - a. Meningkatkan kesadaran publik untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi melalui sistem pelayanan komunikasi masyarakat di unit pelaksana tugas (UPT).
  - b. Mewujudkan komitmen Pemerintah Pusat dan/atau Daerah dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM warga negara.
2. Misi: Menciptakan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang memahami, mengetahui, dan memiliki kesadaran terhadap P5HAM, mencakup:
  - a. Memperkuat kapasitas aparatur negara dan pemerintahan dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
  - b. Memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam upaya P5 HAM.

- c. Meningkatkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian/Lembaga, dan/atau Daerah.
3. Misi: Mewujudkan komitmen HAM Pemerintah Indonesia di tingkat global, nasional, dan lokal, mencakup:
  - a. Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Indonesia pada mekanisme HAM internasional melalui pelaporan implementasi instrumen HAM yang telah diratifikasi.
  - b. Mewujudkan keselarasan kebijakan nasional dan daerah dengan standar norma hak asasi manusia yang telah diratifikasi.
  - c. Mewujudkan upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam penyediaan instrumen HAM sebagai pengejawantahan tanggung jawab HAM pemerintah Indonesia.
4. Misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui akuntabilitas pelaksanaan P5HAM, mencakup:
  - a. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM yang berbasis pada dampak penikmatan HAM warga negara.
  - b. Mendorong P5HAM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui penilaian Kriteria KKP HAM.
  - c. Mewujudkan kerja sama HAM, baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka P5HAM.
  - d. Meningkatkan aksesibilitas layanan informasi terkait dengan hak asasi manusia melalui sistem informasi, baik bagi aparatur pemerintahan di tingkat pusat, daerah, maupun warga negara.
  - e. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan P5HAM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

## II.2. Perjanjian Kinerja

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja, terdapat sasaran, indikator sasaran sampai dengan target yang telah ditetapkan, agar suatu kinerja dapat terukur dengan jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dengan Menteri Hukum dan HAM tahun 2023 sebagai berikut:



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Dhahana Putra  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly  
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

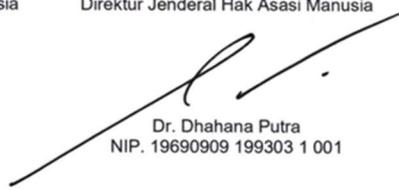
Jakarta, April 2023

Pihak Kedua,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra  
NIP. 19690909 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	75,0% 45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	25% 50% 75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	1. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%
2.	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	1. Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	100%
3.	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	1. Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	100%
4.	Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	1. Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	70%
5.	Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Tersedianya Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1 Dokumen
7.	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
8.	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1. Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1 Rekomendasi
9.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	109 Instansi Pemerintah
		2. jumlah kab/kota peduli HAM	57 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	33 Instansi Pemerintah
10.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	99 Rekomendasi
11.	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	1. Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	90%
12.	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		2. Jumlah Layanan Internal	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan



**DJHAM**

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

**Capaian Kinerja Organisasi**  
**Realisasi Anggaran**  
**Capaian Kinerja Anggaran**  
**Capaian Kinerja Lainnya**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**



**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja Strategis/Program/Kegiatan selama Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel III.1. Capaian Target Sasaran Strategis Ditjen HAM  
(IKU Kementerian)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN TARGET	PENJELASAN
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian <b>Aksi HAM Pemerintah Pusat</b> memenuhi target	75%	<b>123,04%</b>	Realisasi merupakan hasil perhitungan B04, B08 dan B12 K/L dibagi 3 periode pelaporan yaitu: $\frac{89,39+92,65+94,81}{3} \times 100\% =$ <b>92,28%</b> .
	Persentase capaian <b>Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten /Kota</b> memenuhi HAM	45%	<b>169,86%</b>	Realisasi merupakan hasil perhitungan B04, B08 dan B12 Provinsi/Kab/Kota dibagi 3 periode pelaporan yaitu: $\frac{77,97+73,90+77,45}{3} \times 100\% =$ <b>76,44%</b> .

Sumber data: Laporan RANHAM B12 Tahun 2023

**Tabel III.2. Capaian Target Sasaran Program Ditjen HAM  
(IKU Ditjen HAM)**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	CAPAIAN TARGET	PENJELASAN
<b>Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM</b>	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%	208%	Realisasi Target Tahun 2023 adalah sebesar 52%. Dengan rumus :  $\frac{267 \text{ Kab-Kota Predikat Pedul}}{514 \text{ Total Kab-Kota}} \times 100\% = 52\%$
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	127,6%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 63,8%. Dengan rumus :  $\frac{184 \text{ tanggapa}}{288 \text{ dugaan pelanggaran HAM}} \times 100\% = 63,8\%$
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	109,57%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 82,18%. Dengan rumus :  $\frac{715 \text{ yg menindaklanjuti}}{870 \text{ yang menerima diseminasi}} \times 100\% = 82,18\%$

**Tabel III.3. Capaian Target Sasaran Kegiatan Ditjen HAM**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	PENJELASAN
<b>Meningkatnya</b> jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	109,57%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 82,18%. Dengan rumus :  $\frac{71 \text{ yg menindaklanjuti}}{870 \text{ yang menerima diseminasi}} \times 100\% = 82,18\%$
<b>Tersedianya</b> informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	100%	100%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan rumus :  $\frac{17 \text{ info yg digunakan}}{17 \text{ jumlah info yg tersedia}} \times 100\% = 100\%$
<b>Meningkatnya</b> kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	100%	100%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan rumus :  $\frac{8 \text{ kerjasam ditindaklanjuti}}{8 \text{ kerjasama yg dijaiki}} \times 100\% = 100\%$
Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	70%	116,74%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 81,72%. Dengan rumus : Jumlah rata-rata capaian Aksi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	PENJELASAN
				K/L/D B04-B08-B12 <b>dibagi 3</b> Periode pelaporan $\frac{(92,28\%+78,34\%+74,54)}{3} \times 100\% = 81,72\%$
Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%	208%	Realisasi Target Tahun 2023 adalah sebesar 52%. Dengan rumus : $\frac{267 \text{ Kab-Kota Predikat Peduli}}{514 \text{ Total Kab-Kota}} \times 100\% = 52\%$
Tersedianya strategi Nasional Bisnis dan HAM	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1 Dokumen	100%	Realisasi Target Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan rumus : $\frac{1 \text{ Rekom Kebijakan BHAM}}{1 \text{ Target rekom kebijakan BHAM}} \times 100\% = 100\%$
Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	127,6%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 63,8%. Dengan rumus : $\frac{184 \text{ tanggapan}}{288 \text{ dugaan pelanggaran HAM}} \times 100\% = 63,8\%$
Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran	Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran	1 Rekomendasi	100%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan rumus : $\frac{1 \text{ rekom HAM Berat}}{1 \text{ Target rekom HAM Berat}} \times 100\% = 100\%$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	PENJELASAN
Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial			=100%
<b>Meningkatnya pemerintah daerah</b> yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	109 Instansi Pemerintah	363,3%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 363,3% Dengan rumus: $\frac{396 \text{ Instansi yg berpartisipasi}}{109 \text{ target Instansi pemerintah}} \times 100\% = 363,3\%$
	Jumlah kab/kota peduli HAM	57 Instansi Pemerintah	468,42%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 468,42% Dengan rumus: $\frac{267 \text{ Kab-Kota Peduli HAM}}{57 \text{ Target Instansi Pemerintah}} \times 100\% = 468,42\%$
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	33 Instansi Pemerintah	727,27%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 727,27% Dengan rumus: $\frac{240 \text{ Unit Kerja penerima P2HAM}}{33 \text{ Target Instansi Pemerintah}} \times 100\% = 727,27\%$
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan	Tersedianya rekomendasi Pelindungan	99 Rekomendasi	189,89%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 189,89% Dengan rumus:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	PENJELASAN
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			$\frac{188 \text{ Rekom yg terpenuhi}}{99 \text{ Target Rekomendasi}} \times 100\% = 189,89\%$
Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	90%	111,11%	Realisasi Target tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan rumus :  $\frac{9 \text{ rekomendasi PUU}}{9 \text{ Target rekomendas PUU}} \times 100\% = 100\%$
Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	Fasilitasi layanan dukungan manajemen yang telah dimanfaatkan untuk mendukung capaian kinerja Ditjen HAM yaitu layanan BMN, Humas, Protokoler, ORTA internal, Umum, Perkantoran Ditjen HAM, Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Manejemen Keuangan, Reformasi Kinerja, dan Penyelenggaraan kearsipan.
	Jumlah Layanan Internal	1 Layanan	1 Layanan	Fasilitasi layanan internal yang telah dimanfaatkan untuk mendukung capaian kinerja Ditjen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	PENJELASAN
				HAM yaitu layanan Manajemen SDM.
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Fasilitasi layanan perkantoran yang telah dimanfaatkan sebagai supporting yaitu layanan Sarana Internal dan Prasarana Internal.

### Sasaran Strategis Ditjen HAM

**Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM**

Sasaran strategis ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu, Persentase capaian Aksi HAM **Pemerintah Pusat** memenuhi target dengan target 75% dan Persentase capaian Aksi HAM **Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota** memenuhi HAM dengan target 45%.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target dan Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM tahun 2023 sudah tercapai. Target yang ditetapkan untuk capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat adalah 75%, dengan realisasi sebesar 92,28%. Sedangkan target yang ditetapkan untuk capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota adalah 45%, dengan realisasi sebesar 76,44%.

**Tabel III.4. Capaian Target dan Realisasi IKU Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target</b>	75%	92,28%	123,4%
<b>Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM</b>	45%	76,44%	169,86%

- ❖ Formulasi perhitungan Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target periode (B04 + B08 + B12)}}{\sum \text{3 Periode Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(89,39+92,65+94,81)}{3} \times 100\%$$

$$= \mathbf{92,62\%}$$

- ❖ Formulasi perhitungan Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota memenuhi HAM

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah memenuhi target period (B04+B08+B12)}}{\sum \text{3 Periode Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah memenuhi target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(77,97+73,9+77,45)}{3} \times 100\%$$

$$= \mathbf{76,44\%}$$

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Aksi HAM sendiri adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam periode tahun 2021-2025, target sasaran empat kelompok terdiri dari Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat. Pada setiap kelompok memiliki fokus masing-masing yang berbeda dalam pelaksanaan Aksi HAM guna mencapai suatu kesetaraan yang sama di mata hukum.

Pada tahun 2023, Aksi HAM dirancang sebagai bentuk kelanjutan dari Aksi HAM 2022. Pada Aksi HAM Pusat (Kementerian/Lembaga) Capaian Aksi HAM K/L tahun 2023 merupakan hasil rata-rata akumulasi capaian periode B04-B08-

B12 yang diperoleh melalui formulasi perhitungan yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan RANHAM Tahun 2023.

Pada tahun 2023 terdapat 30 Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan Aksi HAM, dan pada setiap periode pelaporan masih terdapat Kementerian/Lembaga yang belum berpartisipasi. Pada periode B04 terdapat 3 K/L yang tidak melapor, periode B08 1 K/L yang tidak melapor, dan periode B12 4 K/L yang tidak melapor. Namun **tahun 2023 terdapat 9 Kementerian/Lembaga (30%) yang konsisten memperoleh nilai 100 (maksimal)** pada 3 periode pelaporan tersebut. Pada tabel di bawah ini terlihat daftar 9 K/L yang konsisten berpartisipasi dan memperoleh nilai maksimal dalam pelaksanaan Aksi HAM.

**Tabel III.5. Daftar Kementerian/Lembaga yang Konsisten Berpartisipasi dan Mendapatkan Nilai Maksimal dalam Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2023**

No	Nama Kementerian/Lembaga
1.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
5.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6.	Kementerian Perhubungan
7.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
8.	Kementerian Ketenagakerjaan
9.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sumber data: Laporan Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan target Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM, bahwa pada tahun 2023 dapat diketahui untuk Pemerintah Daerah Provinsi dari total 34 Provinsi, pada setiap periode masih terdapat Provinsi yang tidak berpartisipasi. Periode B04 terdapat 3 Provinsi yang tidak melapor, periode B08 terdapat 2 Provinsi yang tidak melapor, dan periode B12 terdapat 3 Provinsi yang tidak melapor.

Namun dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam pelaporan Aksi HAM Tahun 2023, yang konsisten memperoleh **nilai capaian di atas 90 adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta dan Bali.**

Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kab/Kota dari 508 Kab/Kota, pada setiap periode jumlah partisipasinya fluktuatif, periode B04 sebanyak 422 Kab/Kota yang berpartisipasi, periode B08 sebanyak 459 Kab/Kota yang berpartisipasi, dan periode B12 sebanyak 447 Kab/Kota yang berpartisipasi.

Dari Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam pelaporan Aksi HAM Tahun 2023, **terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mencapai nilai rata-rata maksimal 100. Kabupaten/Kota tersebut konsisten mendapatkan nilai maksimal dari Periode B04 B08 dan B12, yaitu Kab. Tulang Bawang, Kab. Bondowoso, Kota Madiun, Kab. Gorontalo, dan Kab. Mamuju Tengah.**

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target dan Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM Tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel III.6. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Ditjen HAM tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70%	93,25%	133,2%	75%	92,28%	123,4%
Persentase capaian Aksi HAM	40%	69,94%	174,8%	45%	76,44%	169,86%

Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota memenuhi HAM						
---	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Aksi HAM Pusat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan Realisasi Aksi HAM Daerah mengalami kenaikan.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target dan Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2021 karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Aksi HAM Generasi ke V.

**Tabel III.7. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Ditjen HAM tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%	89,09%	70%	93,25%	75%	92,28%
Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota memenuhi HAM	35%	59,92%	40%	69,94%	45%	76,44%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Aksi HAM Pusat bersifat fluktuatif dimana tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk Realisasi Aksi HAM Daerah memiliki tren positif dengan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target dan Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM).

#### **5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan K/L/D yang mendapatkan nilai tinggi dalam pelaksanaan 2 (dua) indikator kinerja sasaran Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target dan Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM, antara lain:

- ❖ Secara substansi data dukung aksi HAM yang dilaporkan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang ditetapkan pada Perpres 53/2021;
- ❖ Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memahami substansi dan melaksanakan aksi HAM yang telah ditetapkan;
- ❖ Dukungan pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan Perpres 53/2021 secara optimal; dan
- ❖ Unit dan organisasi di bawah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sinergis dalam melaksanakan Aksi HAM dan aktif berkoordinasi dengan Panitia Nasional RANHAM Pusat dan Daerah.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada K/L/D antara lain:

- ❖ Dalam pelaporan, masih banyak data dukung yang tidak memenuhi aspek administrasi. Sehingga, banyak aksi yang dilaporkan tidak mendapatkan nilai maksimal karena tidak memenuhi nilai administrasi;
- ❖ Masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pelaporan RANHAM terutama Pemerintah Daerah mengenai dokumen/data dukung yang menjadi aspek penilaian yang harus dilaporkan;
- ❖ Kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi sebelum dilakukannya pelaksanaan pelaporan Aksi HAM terutama kepada Pemerintah Daerah; dan
- ❖ Kurangnya komitmen tanggung jawab pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM yang merupakan kewajiban negara baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melihat masih ada yang tidak melaporkan dan/ melaksanakan aksi HAM dengan kurang optimal.

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM tahun 2023 menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan tingkat partisipasi, outcome terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Menyiapkan aplikasi Monev SAPAHAM yang akan memfasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaporan Aksi HAM tahun 2023 menggantikan aplikasi Monev Kantor Staf Presiden;
- ❖ Perlu lebih massif dilaksanakannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pelaporan aksi HAM oleh Panitia Nasional RANHAM;
- ❖ Untuk meningkatkan jumlah partisipasi dan kualitas pelaporan aksi HAM, perlu komitmen dari pimpinan K/L/D dan pemahaman bahwa RANHAM bukanlah sekedar formalitas pembangunan HAM, namun dokumen politik HAM yang menjadi tolok ukur terhadap komitmen

- penyelenggara kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM; dan
- ❖ Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarunit di internal Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dengan target-target Ukuran Keberhasilan Aksi HAM, termasuk di dalamnya adalah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan Aksi HAM tahun berjalan

## Sasaran Program Ditjen HAM

### Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM

Sasaran program ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja program yaitu, Persentase Kab/Kota Peduli HAM dengan target 25%, Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 50%, dan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM dengan target 75%.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase Kab/Kota Peduli HAM, Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM tahun 2023 sudah tercapai.

Target yang ditetapkan untuk Persentase Kab/Kota Peduli HAM (KKP HAM) adalah 25%, dengan realisasi tahun 2023 adalah **52% jumlah Kab/Kota yang berpredikat Peduli HAM**.

Untuk Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan target yang ditetapkan adalah 50%, dengan realisasi tahun 2023 adalah 63,8%.

Sedangkan untuk Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM target yang ditetapkan adalah 75%, dengan realisasi tahun 2023 adalah 82,18%.

**Tabel III.8. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%	52%	208%
Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	63,8%	127,6%

Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	82,18%	109,57%
---	-----	--------	---------

❖ Formulasi perhitungan Persentase Kab/Kota Peduli HAM

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah kabupaten kota yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\sum \text{Total Jumlah kabupaten kota}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{267}{514} \times 100\% \\ &= \mathbf{52\%} \end{aligned}$$

❖ Formulasi perhitungan Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan}}{\sum \text{Total target dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{184}{288} \times 100\% \\ &= \mathbf{63,8\%} \end{aligned}$$

❖ Formulasi perhitungan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

$$\% = \frac{\sum \text{Instansi yang menindaklanjuti diseminasi dan penguatan HAM}}{\sum \text{Instansi yang telah menerima diseminasi dan penguatan HAM}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{715}{870} \times 100\% \\ &= \mathbf{82,18\%} \end{aligned}$$

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Peduli Hak Asasi Manusia adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk

meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Adapun tujuan penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM yaitu:

- untuk memotivasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tanggung jawab melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- Mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- Memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Kabupaten/Kota Peduli HAM diselenggarakan terhadap 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi kriteria KKP HAM dan menyampaikan Laporan pelaksanaan KKP HAM sesuai dengan prosedur yang dijelaskan di dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021.

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kab/Kota Peduli HAM adalah sebagai berikut:

- Dari total 514 kabupaten/kota, terdapat 460 kabupaten/kota yang melapor;
- Dari 460 kabupaten/kota yang melapor, terdapat **267 kabupaten/kota (52%) yang mendapatkan Peduli HAM**, 41 kabupaten/kota (8%) yang mendapatkan Cukup Peduli, dan 71 kabupaten/kota (14%) yang mendapatkan Mulai Peduli;
- 54 kabupaten/kota (10.5%) yang tidak melaporkan data KKPHAM

Pada bulan Januari-Desember 2023, Direktorat Yankomas telah menerima sebanyak 946 pengaduan, baik yang diadukan secara langsung maupun yang tidak diadukan secara langsung. Dari 946 jumlah pengaduan yang diterima, sebanyak 367 dugaan pelanggaran HAM langsung difile dikarenakan komunikasi tersebut hanya sebatas tembusan atau tidak termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. 168 pengaduan telah dilakukan telaah rekomendasi, 117 dugaan pelanggaran HAM dilakukan rekomendasi karena bersifat segera, 35 dugaan pelanggaran HAM telah ditelaah file, dan sebanyak 259 surat masih dalam proses penelaahan. Pengaduan yang telah

ditindaklanjuti dan telah mendapatkan tanggapan dari instansi terkait sebanyak 184. Berdasarkan total target capaian output Dit. Yankomas tahun 2023 yaitu sebanyak 288 penanganan, perlu dicapai capaian output sebanyak 144 tanggapan instansi (rumus perhitungan target caput ialah 50% dari total target 288 sama dengan 144 target caput). **Jadi capaian output pada tahun 2023 adalah  $184/288=63,8\%$ .** Adapun sebaran *locus* data pengaduan berdasarkan Provinsi dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.9. Tindak Lanjut Komunikasi berdasarkan Locus  
Dugaan Pelanggaran HAM**

NO	PROVINSI	REKAPITULASI PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT JANUARI - DESEMBER 2023						
		PROSES	FILE	TELAAH FILE	TELAAH REKO- MENDASI	REKO- MENDASI	JUMLAH	JUMLAH TANG- GAPAN
1.	Aceh	2	1	0	0	3	6	0
2.	Sumatera Utara	46	57	1	15	14	133	19
3.	Sumatera Barat	8	15	0	4	3	30	7
4.	Jambi	10	12	-	1	1	24	2
5.	Sumatera Selatan	6	10	1	3	4	24	5
6.	Riau	5	11	3	7	1	27	9
7.	Kep. Riau	2	2	1	2	1	8	2
8.	Kep. Babel	1	3	1	4	-	9	4
9.	Bengkulu	3	1	0	4	3	11	6
10.	Lampung	7	6	1	3	12	29	1
11.	Banten	12	19	-	3	4	38	7
12.	DKI Jakarta	28	39	2	12	11	92	13

NO	PROVINSI	REKAPITULASI PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT JANUARI - DESEMBER 2023						
		PROSES	FILE	TELAAH FILE	TELAAH REKO- MENDASI	REKO- MENDASI	JUMLAH	JUMLAH TANG- GAPAN
13.	Jawa Barat	33	48	3	17	13	114	19
14.	Jawa Tengah	7	18	4	13	3	45	19
15.	DI Yogyakarta	1	7	-	6	-	14	2
16.	Jawa Timur	22	33	3	10	12	80	11
17.	Kalimantan Barat	3	2	-	3	-	8	2
18.	Kalimantan Tengah	8	6	-	3	1	18	3
19.	Kalimantan Timur	7	3	-	8	3	21	7
20.	Kalimantan Selatan	2	5	1	6	1	15	5
21.	Kalimantan Utara	1	2	1	1	-	5	-
22.	Bali	9	18	-	1	1	29	2
23.	Nusa TenggaraBarat	6	6	-	1	-	13	1
24.	Nusa Tenggara Timur	4	5	5	6	1	21	5
25.	SulawesiUtara	4	4	-	2	1	11	3
26.	Gorontalo	2	-	-	1	0	3	1
27.	Sulawesi Tengah	-	3	-	4	1	8	6
28.	SulawesiBarat	-	-	-	2	-	2	1
29.	Sulawesi Tenggara	8	10	-	-	3	21	2

NO	PROVINSI	REKAPITULASI PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT JANUARI - DESEMBER 2023						
		PROSES	FILE	TELAAH FILE	TELAAH REKO- MENDASI	REKO- MENDASI	JUMLAH	JUMLAH TANG- GAPAN
30.	Sulawesi Selatan	5	7	4	15	-	31	7
31.	Maluku	1	6	-	-	5	12	1
32.	Maluku Utara	2	1	-	1	-	4	1
33.	Papua Barat	1	3	-	-	-	4	-
34.	Papua	3	4	4	7	-	18	1
35.	Nasional	-	-	-	2	-	2	-
36.	Luar Negeri	-	-	-	1	15	16	16
	<b>TOTAL</b>	259	367	35	168	117	946	<b>184</b>

Sumber data: Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Jan-Des 2023

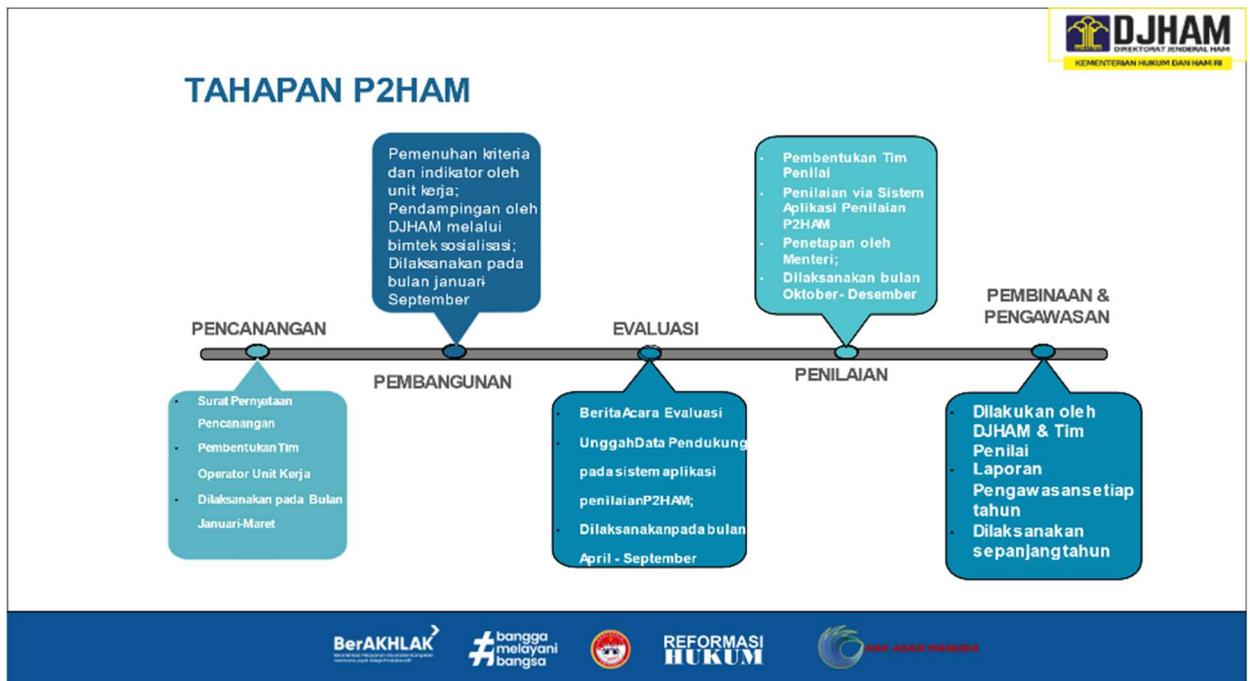
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) sampai Oktober tahun 2023 sudah tercapai karena sudah terdapat 715 Unit Kerja Kemenkumham di seluruh Indonesia yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk P2HAM.

Pada tahun 2023 Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM telah melaksanakan Diseminasi dan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM di 15 provinsi. Pada 9 Provinsi yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Jawa Barat, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM melaksanakan kegiatan Diseminasi HAM dengan tema 10 HAM dasar kepada masyarakat dan ASN, bersamaan dengan hal tersebut juga mengunjungi Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan diseminasi dan penguatan pelayanan publik berbasis HAM.

Kemudian pada 6 Provinsi yakni Sulawesi Barat, D.I Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM melakukan diseminasi dan penguatan pelayanan publik berbasis HAM.

Selain mengunjungi Unit Kerja dilingkungan Kemenkumham secara langsung, pada bulan Agustus 2023, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM juga melakukan diseminasi dan penguatan pelayanan publik berbasis HAM melalui zoom kepada seluruh Unit Kerja di Kemenkumham RI melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan secara daring. Rakor tersebut diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Unit Kerja Kemenkumham. Pada Rakor tersebut, dilakukan juga diseminasi mengenai Aplikasi Penilaian P2HAM dan perubahan-perubahan kriteria & indikator P2HAM.

Kemudian pada bulan Oktober Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM telah melaksanakan tahapan penilaian P2HAM. Adapun tahap penilaian dilakukan dalam menentukan Unit Kerja yang mendapatkan penghargaan P2HAM. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM dapat digambarkan sebagai berikut :



Tahun 2023 merupakan awal mulainya pelaksanaan penilaian P2HAM, dikarenakan Tahun 2022 merupakan masa transisi pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022 tentang P2HAM. Pada tahun 2022 sampai dengan Maret 2023, dari 870 Unit Kerja yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 860 Unit Kerja melakukan Pencanaan dan Pembangunan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Unit Kerja dimaksud terdiri dari Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM, Balai Harta Peninggalan, Rumah Sakit Pengayoman, Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Sampai dengan Semester I, sebanyak 47 Unit Kerja yang telah menindaklanjuti pelayanan publik berbasis HAM berdasarkan Unit Kerja yang telah mengirimkan Surat Keputusan Penunjukkan Operator P2HAM. Berikut data dukung tabel unit kerja yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan dalam bentuk P2HAM:

**Tabel III.10. Daftar Unit Kerja yang telah menindaklanjuti Hasil Diskuat HAM dalam bentuk P2HAM pada Semester I Tahun 2023**

No	Nama Unit Kerja
1.	Bapas Kelas II Polewali
2.	Lapas Kelas III Mamasa
3.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar
4.	Lapas Kelas IIB Polewali
5.	Rutan Kelas IIB Mamuju
6.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju
7.	Rutan Kelas IIB Majene
8.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju
9.	Kantor Wilayah Sulawesi Barat
10.	Rupbasan Kelas II Mamuju
11.	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju
12.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna
13.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara
14.	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bitung

No	Nama Unit Kerja
15.	Rutan Kelas IIB Kotamobagu
16.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tagulandang
17.	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado
18.	Lapas Kelas III Tamako
19.	Lapas Kelas IIA Manado
20.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lirung
21.	Lapas Kelas IIB Tondano
22.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Enemawira
23.	Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado
24.	Rudenim Manado
25.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado
26.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tahuna
27.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung
28.	Lapas Perempuan Kelas II B Manado
29.	LPKA Kelas II Tomohon
30.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara
31.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau
32.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang
33.	Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Utara
34.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu
35.	Rupbasan Kelas I Manado
36.	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura
37.	Lapas Kelas IIB Tanjung
38.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
39.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai
40.	Rutan Kelas IIB Kandangan
41.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
42.	Lapas Kelas IIB Banjarbaru
43.	Rutan Kelas IIB Rantau
44.	Lapas Kelas III Batulicin
45.	Lapas Kelas IIB Amuntai
46.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Batulicin

No	Nama Unit Kerja
47	LPKA Kelas I Martapura

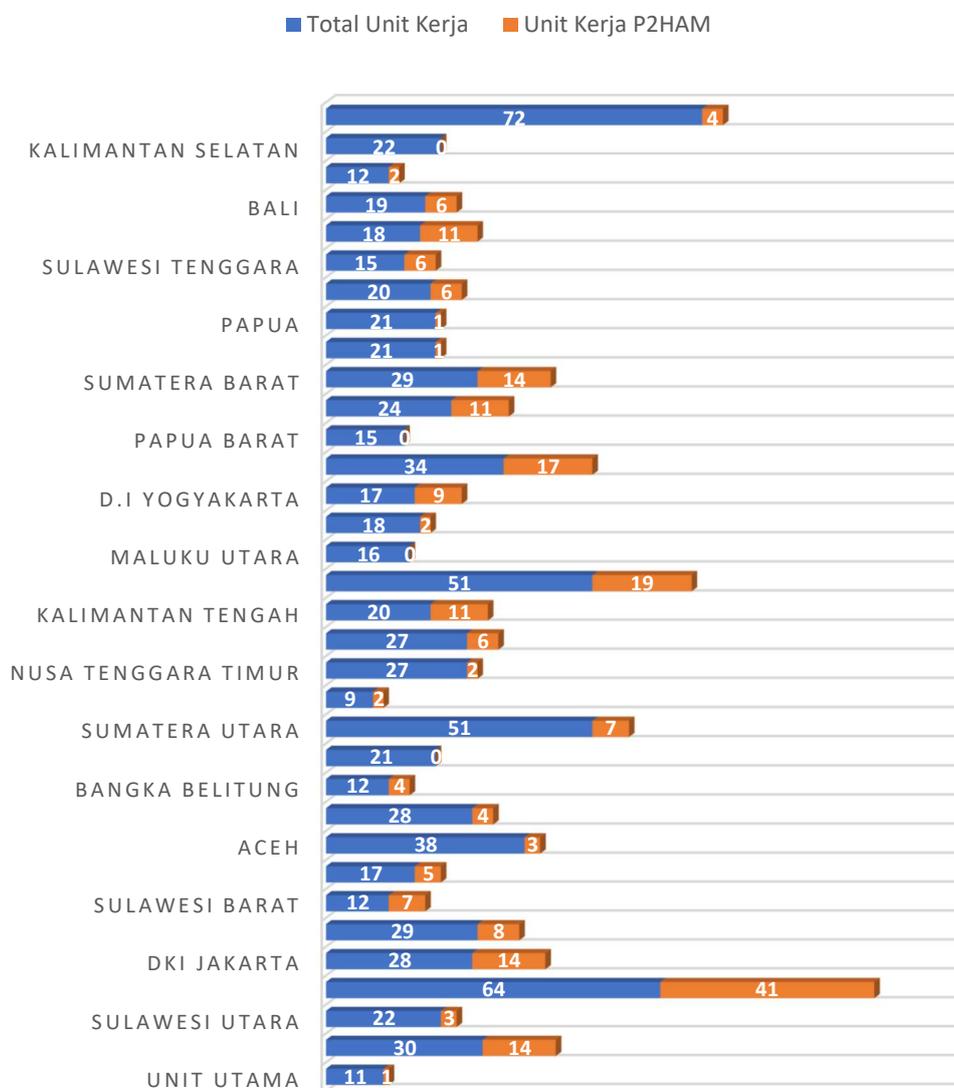
Sumber data: Laporan kinerja Dit. Diskuat semester I 2023

Kemudian pada tahap evaluasi, dari 860 Unit Kerja yang melakukan pencaangan pelayanan publik berbasis HAM, terdapat 715 Unit Kerja yang mengirimkan data dukung P2HAM kepada Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM. Pengiriman data dukung ini tentu sudah merupakan wujud pelaksanaan P2HAM sebagai tindak lanjut dari diseminasi dan penguatan HAM.

Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM kemudian memberikan rekomendasi kepada seluruh Unit Kerja yang mengirimkan data dukung dimaksud agar dapat memenuhi kriteria/indikator P2HAM berdasarkan Permenkumham No. 2 Tahun 2022 Tentang P2HAM. Selanjutnya, Unit Kerja yang berhasil memenuhi kriteria/indikator P2HAM atau yang lolos pada tahap evaluasi, kemudian diberikan Berita Acara Hasil Evaluasi untuk dapat mengunggah data dukung ke aplikasi P2HAM. Dari 715 Unit Kerja yang mengirimkan data dukung, 282 Unit Kerja berhasil mendapatkan Berita Acara Hasil Evaluasi dan 433 Unit Kerja tidak lolos evaluasi dan mendapatkan surat keterangan dikarenakan belum memenuhi kriteria/indikator P2HAM berdasarkan Permenkumham No. 2 Tahun 2022 Tentang P2HAM.

Sebagaimana periode waktu pelaksanaan tahapan evaluasi P2HAM berakhir pada bulan September, maka pada B09 telah disusun rekapitulasi data mengenai Unit Kerja yang berhasil memasuki tahapan selanjutnya, yakni tahap penilaian P2HAM. Pada tahapan penilaian P2HAM, terdapat 41 Unit Kerja yang dinyatakan masih belum memenuhi kriteria/indikator penilaian P2HAM berdasarkan data dukung yang telah dikirim Unit Kerja melalui aplikasi P2HAM. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hanya **241 Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat P2HAM** dikarenakan telah memenuhi seluruh data dukung yang sesuai dengan kriteria/indikator penilaian P2HAM. Berikut grafik yang menggambarkan jumlah Unit Kerja yang berhasil mendapatkan ataupun tidak mendapatkan predikat Unit Kerja Kemenkumham dan perbandingannya dengan jumlah Unit Kerja di wilayah masing-masing :

## UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENGHARGAAN P2HAM



	Total
Jumlah Unit Kerja	870
Jumlah Unit Kerja P2HAM	241

Namun demikian, walaupun hanya 241 Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat P2HAM, tetapi 715 Unit Kerja telah menindaklanjuti diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk upaya mewujudkan P2HAM. Data dukung yang

dikirimkan oleh 715 Unit Kerja cukup menunjukkan tingginya semangat dan upaya dari Unit Kerja Kemenkumham dalam mewujudkan P2HAM.

Maka sebagaimana Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Diseminasi dan Penguatan HAM adalah persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk P2HAM, maka formulasi perhitungan yang digunakan adalah “perbandingan jumlah instansi pemerintah (Unit Kerja) yang menindaklanjuti diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk P2HAM dengan jumlah instansi pemerintah (Unit Kerja) yang telah menerima diseminasi dan penguatan HAM pada tahun berjalan”. Angka yang menjadi jumlah Unit Kerja yang menindaklanjuti diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk P2HAM adalah *jumlah keseluruhan Unit Kerja yang mengirimkan data dukung penilaian P2HAM*. Sedangkan angka jumlah instansi pemerintah (Unit Kerja) yang telah menerima diseminasi dan penguatan HAM pada tahun berjalan adalah *jumlah keseluruhan Unit Kerja yang telah menerima diseminasi dan penguatan HAM*, baik melalui kunjungan langsung maupun melalui Rakor yang diselenggarakan secara daring.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Kab/Kota Peduli HAM, Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM Tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel III.11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%	40,5%	203%	25%	52%	208%
Persentase penanganan dugaan pelanggaran	50%	70%	140%	50%	63,8%	127,6%

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan						
Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	84,25%	112%	75%	82,18%	109,57%

Pada tabel di atas bisa dijelaskan bahwa realisasi dan capaian Persentase Kab/Kota Peduli HAM tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,5%, sedangkan Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan mengalami penurunan sebesar 6,2%. Dan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM mengalami penurunan sebesar 2,07%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Program ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja program yaitu Persentase Kab/Kota Peduli HAM, Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel III.12. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Program Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10%	59%	15%	KKP HAM tahun 2021 ditiadakan untuk	20%	40,5%	25%	52%

Indikator	2020		2021		2022		2023		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
				sementara , sesuai dengan Surat Direktur Jenderal HAM No HAM- HA.02.02- 17 tanggal 28 Juli 2021 terkait Peniadaan Pelaksana an Penilaian Kabupaten /Kota Peduli HAM (KKP HAM) pada tahun 2021 yang disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui disposisi tanggal 26 Agustus 2021					
Persentase penangan an dugaan pelanggara an HAM yang ditindaklanj uti oleh pemangku kepentinga n	50%	138,75%	50%	75,60%	50%	70%	50%	63,8%	

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	92,70%	75%	95,35%	75%	84,25% (tahun 2022 sebagai tahun transisi tahapan yang dilaksanakan adalah <b>Pencanangan dan Pembangunan</b> )	75%	82,18%

Pada tahun 2021 terkait realisasi Persentase Kab/Kota Peduli HAM tidak ada realisasi karena kegiatan dimaksud ditiadakan akibat pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 terkait realisasi Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM hasil yang diperoleh ialah dari pencanangan dan pembangunan P2HAM karena Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang baru, memuat beberapa perbedaan tahapan dalam pembentukan P2HAM dan penambahan kriteria serta indikator P2HAM sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk memahami dan menguasai pelaksanaan P2HAM.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja program ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Kab/Kota Peduli HAM, Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM).

## 5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

### a) Persentase Kab/Kota Peduli HAM

Pelaporan Penilaian KKP HAM dimulai sejak Januari 2023. Pemerintah Daerah mengumpulkan data penilaian sampai akhir Februari 2023. Awal Maret sampai pertengahan Mei 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap data dukung penilaian yang dikirimkan oleh Pemda Kab/Kota. Setelah melakukan pemeriksaan dan data dukung penilaian dianggap layak untuk diikutkan dalam penilaian KKP HAM. Kantor Wilayah melaporkan data hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi KKP HAM ([kkpham.kemenkumham.go.id](http://kkpham.kemenkumham.go.id)) sampai akhir Mei 2023. Pada akhir Mei dapat dilaporkan bahwa dari 514 Kabupaten/Kota, terdapat 461 Kab/Kota (89,6%) yang mengirimkan laporan. Sejak awal Juni sampai akhir Juli dilakukan verifikasi oleh Ditjen HAM terhadap laporan yang telah dikirimkan. Pada bulan Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat penilaian oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Kepmenkumham RI nomor M.HH-01.HAM.02.01.01 tahun 2023 dan dihasilkan jumlah Kab/Kota peduli HAM sebanyak 267 Kab/Kota (52%) dari total 514 Kabupaten Kota. Kemudian, pada tanggal 10 Desember 2023, bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, Menteri Hukum dan HAM secara resmi memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat Peduli HAM.

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Persentase Kab/Kota Peduli HAM, antara lain:

- ❖ Meningkatnya koordinasi antara Direktorat Jenderal HAM, Kanwil Kemenkumham, dan Pemda Provinsi/Kab/Kota dalam pelaksanaan KKP HAM;
- ❖ Adanya dukungan pimpinan Pemda Provinsi/Kab/Kota dalam pelaksanaan KKP HAM; dan
- ❖ Terlaksananya sinergitas antara Pemda Provinsi/Kab/Kota dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya dalam melaksanakan KKP HAM.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan KKP HAM antara lain:

- ❖ Belum adanya nomenklatur terkait HAM pada Pemda Kab/Kota;
- ❖ Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan KKP HAM baik di Pusat maupun di Daerah;
- ❖ Secara substansi indikator yang ada pada Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang KKP HAM masih dianggap sulit untuk dilakukan pengumpulan data dukung dari OPD terkait. Disebabkan karena belum semua program yang dimiliki Pemda sejalan dengan indikator yang ada di dalam Permenkumham KKP HAM. Sehingga data dukung yang disampaikan tidak sesuai;
- ❖ Belum adanya pedoman substansi atas indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM karena SDM kanwil dan pemda tidak memahami substansi indikator dan tidak dapat melakukan pelaporan yang sesuai dengan aplikasi; dan
- ❖ Tidak terlaksananya bimbingan teknis kepada operator KKP HAM (Kanwil Kemenkumham) terkait aplikasi pelaporan KKP HAM sebelum dilakukannya pemeriksaan dan penginputan data dukung pelaporan KKP HAM; dan Kurangnya komitmen tanggung jawab pelaksanaan dan pelaporan KKP HAM yang merupakan kewajiban negara baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melihat masih ada yang tidak melaporkan dan/ melaksanakan KKP HAM dengan optimal.

#### **b) Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM antara lain:

- ❖ Pelaksanaan koordinasi dan klarifikasi dengan pemangku kepentingan melalui beberapa cara (surat, audiensi, FGD, koordinasi langsung dengan pemangku kepentingan) dan melibatkan kantor wilayah dalam upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM;
- ❖ Pemantauan terhadap laporan pengaduan yang sudah mendekati batas akhir waktu penanganan;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk percepatan penanganan dugaan pelanggaran HAM;
- ❖ Melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terkait dengan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM; dan

- ❖ Melakukan koordinasi dengan Direktorat Fasilitas dan Informasi HAM dan Pusdatin terkait pengembangan aplikasi SIMASHAM.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM antara lain:

- ❖ Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM berbeda di tingkat pusat dan wilayah karena Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM belum tersosialisasikan dengan baik di tingkat wilayah;
- ❖ Data pengaduan dugaan pelanggaran HAM belum dapat dikelola secara maksimal dan belum terintegrasi antara pengaduan di tingkat pusat dan daerah disebabkan karena Aplikasi Pengaduan HAM (SIMASHAM) masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendukung proses penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM berdasarkan mekanisme yang ada pada Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM; dan
- ❖ Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 23 tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di wilayah yang belum banyak paham dengan aturan sistemetika waktu penyelesian penangannya.

### **c) Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM, antara lain:

- ❖ Adanya kesadaran/kepatuhan Instansi pemerintah/Unit kerja untuk menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM;
- ❖ Peran aktif dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam menjalankan perannya sebagai Pembina Unit-Unit Kerja di Wilayahnya;
- ❖ Peran aktif Pimpinan pada Instansi pemerintah/Unit kerja untuk menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM;
- ❖ Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Unit pusat (Ditjen HAM) sebagai penanggungjawab pelaksanaan (P2HAM) dengan Instansi pemerintah/Unit kerja; dan

- ❖ Konsistensi Unit pusat (Ditjen HAM) sebagai penanggungjawab pelaksanaan (P2HAM) dalam melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM).

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- ❖ Masih terdapat Unit Kerja/Instansi Pemerintah yang belum menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM;
- ❖ Masih terdapat aparatur Unit Kerja/instansi pemerintah belum sepenuhnya berorientasi kepada pelayanan publik berbasis HAM disebabkan kurangnya pemahaman aparatur mengenai P2HAM;
- ❖ Belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi pada beberapa unit kerja/ instansi pemerintah;
- ❖ Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria/indikator P2HAM karena faktor kurangnya anggaran;
- ❖ Masih adanya ketidaksesuaian indikator P2HAM dengan SOP di beberapa Unit kerja/Instansi Pemerintah; dan
- ❖ Pelaksanakan diseminasi dan penguatan pelayanan berbasis HAM bersamaan dengan kegiatan lain sehingga tidak maksimal dalam menjangkau UPT jaraknya jauh.

## **6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

### **a) Persentase Kab/Kota Peduli HAM**

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan KKP HAM menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan tingkat partisipasi, terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM terhadap masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Menyusun pedoman substansi atas indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM supaya SDM kanwil dan pemda dapat memahami substansi indikator dan dapat melakukan pelaporan yang sesuai dengan aplikasi;
- ❖ Melaksanakan bimbingan teknis kepada operator KKP HAM (Kanwil Kemenkumham) terkait aplikasi pelaporan KKP HAM;
- ❖ Melakukan pengembangan aplikasi pelaporan KKP HAM;

- ❖ Perlu lebih massif dilaksanakannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait indikator untuk memaksimalkan pelaksanaan KKP HAM;
- ❖ Untuk meningkatkan kualitas pelaporan KKP HAM perlu dilakukan peninjauan lapangan secara langsung;
- ❖ Untuk meningkatkan jumlah partisipasi KKP HAM, perlu komitmen dari pimpinan Pemerintah Daerah Kab/Kota; dan
- ❖ Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarunit di internal Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan OPD terkait dengan indikator-indikator pada KKP HAM.

**b) Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan tingkat penanganan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM terhadap masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Perlu adanya updating data secara konsisten, khususnya setiap Triwulan, dan berkelanjutan sehingga dapat memonitor proses penanganan komunikasi masyarakat baik di tahun berjalan maupun tahun berikutnya sehingga tercipta data informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- ❖ Perlu adanya pemutakhiran pencatatan data penanganan komunikasi masyarakat yang tidak dilaksanakan secara manual melainkan secara sistem komputerisasi dengan tujuan mempermudah pengisian rekapitulasi data berdasarkan kategori yang disepakati serta mempermudah updating data penanganan komunikasi masyarakat yang belum bisa terselesaikan dan masih harus dimonitor proses penyelesaiannya.

**c) Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM**

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan tindaklanjut hasil Diseminasi dan penguatan HAM menjadi lebih baik lagi.

Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan unit kerja yang menerapkan pelayanan publik yang berbasis HAM , terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM terhadap masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Meningkatkan Diseminasi dan Penguatan dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) secara langsung ke Unit Kerja/Instansi pemerintah;
- ❖ Keterlibatan Unit Pusat dalam memberikan Diseminasi dan penguatan kepada Unit kerja/Instansi pemerintah secara daring sebagai Narasumber Sosialiasi atau Bimtek;
- ❖ Meningkatkan dan atau melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang telah tersedia;
- ❖ Pencanaan Pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) oleh Unit kerja/Instansi pemerintah;
- ❖ Penyampaian data dukung sesuai kriteria pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) oleh Unit kerja/Instansi pemerintah yang menyampaikan; dan
- ❖ Monitoring dan evaluasi berkala Pimpinan Unit kerja/Instansi pemerintah yang telah melaksanakan tahap perencanaan dan pembangunan.

## Sasaran Kegiatan 1 Ditjen HAM

**Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM, dengan target sebesar 75%.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM tahun 2023 sudah tercapai. Target yang ditetapkan untuk instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM adalah 75%, dengan realisasi tahun 2023 adalah 82,18%.

**Tabel III.13. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	82,18%	109,57%

- ❖ Formulasi perhitungan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\sum \text{Instansi yang menindaklanjuti diseminasi dan penguatan HAM}}{\sum \text{Instansi yang telah menerima diseminasi dan penguatan HAM}} \times 100\% \\ \% &= \frac{715}{870} \times 100\% \\ &= \mathbf{82,18\%} \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM telah melaksanakan Diseminasi dan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM di 15 provinsi. Pada 9 Provinsi yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Jawa Barat, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM melaksanakan kegiatan Diseminasi HAM dengan tema 10 HAM dasar kepada masyarakat dan ASN, bersamaan dengan hal tersebut juga mengunjungi Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan diseminasi dan penguatan pelayanan publik berbasis HAM. Kemudian pada 6 Provinsi yakni Sulawesi Barat, D.I Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM melakukan diseminasi dan penguatan pelayanan publik berbasis HAM.

Tahun 2023 merupakan awal mulainya pelaksanaan penilaian P2HAM, dikarenakan Tahun 2022 merupakan masa transisi pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022 tentang P2HAM. Pada tahun 2022 sampai dengan Maret 2023, dari 870 Unit Kerja yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 860 Unit Kerja melakukan Pencanaan dan Pembangunan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Unit Kerja dimaksud terdiri dari Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM, Balai Harta Peninggalan, Rumah Sakit Pengayoman, Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Kemudian pada tahap evaluasi, dari 860 Unit Kerja yang melakukan perencanaan pelayanan publik berbasis HAM, terdapat 715 Unit Kerja yang mengirimkan data dukung P2HAM kepada Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM. Pengiriman data dukung ini tentu sudah merupakan wujud pelaksanaan P2HAM sebagai tindak lanjut dari diseminasi dan penguatan HAM. Dari 715 Unit Kerja yang mengirimkan data dukung, 282 Unit Kerja berhasil mendapatkan Berita Acara Hasil Evaluasi dan 433 Unit Kerja tidak lolos

evaluasi dan mendapatkan surat keterangan dikarenakan belum memenuhi kriteria/indikator P2HAM berdasarkan Permenkumham No. 2 Tahun 2022 Tentang P2HAM. Pada tahapan penilaian P2HAM, terdapat 41 Unit Kerja yang dinyatakan masih belum memenuhi kriteria/indikator penilaian P2HAM berdasarkan data dukung yang telah dikirim Unit Kerja melalui aplikasi P2HAM. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hanya **241 Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat P2HAM** dikarenakan telah memenuhi seluruh data dukung yang sesuai dengan kriteria/indikator penilaian P2HAM. Namun demikian, walaupun hanya 241 Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat P2HAM, tetapi **715 Unit Kerja telah menindaklanjuti diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk upaya mewujudkan P2HAM**. Data dukung yang dikirimkan oleh 715 Unit Kerja cukup menunjukkan tingginya semangat dan upaya dari Unit Kerja Kemenkumham dalam mewujudkan P2HAM.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM tahun 2023 sudah tercapai sehingga dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel III.14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	84,25%	112%	75%	82,18%	109,57%

Dari tabel di atas bisa diambil kesimpulan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun indikator kinerja kegiatan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti

hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM tercapai dengan persentase capaian di atas 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja program yaitu Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel III.15. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	92,70%	75%	95,35%	75%	84,25% (tahun 2022 sebagai tahun transisi tahapan yang dilaksanakan adalah <b>Pencanangan dan Pembangunan</b> )	75%	82,18%

Pada tahun 2022 terkait realisasi Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM hasil yang diperoleh ialah dari pencanangan dan pembangunan P2HAM karena Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang baru, memuat beberapa perbedaan tahapan dalam pembentukan P2HAM dan penambahan kriteria serta indikator P2HAM

sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk memahami dan menguasai pelaksanaan P2HAM.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM).

#### **5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM, antara lain:

- ❖ Adanya kesadaran/kepatuhan Instansi pemerintah/Unit kerja untuk menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM;
- ❖ Peran aktif dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam menjalankan perannya sebagai Pembina Unit-Unit Kerja di Wilayahnya;
- ❖ Peran aktif Pimpinan pada Instansi pemerintah/Unit kerja untuk menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM;
- ❖ Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Unit pusat (Ditjen HAM) sebagai penanggungjawab pelaksanaan (P2HAM) dengan Instansi pemerintah/Unit kerja; dan
- ❖ Konsistensi Unit pusat (Ditjen HAM) sebagai penanggungjawab pelaksanaan (P2HAM) dalam melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM).

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- ❖ Masih terdapat Unit Kerja/Instansi Pemerintah yang belum menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM;
- ❖ Masih terdapat aparatur Unit Kerja/instansi pemerintah belum sepenuhnya berorientasi kepada pelayanan publik berbasis HAM disebabkan kurangnya pemahaman aparatur mengenai P2HAM;

- ❖ Belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi pada beberapa unit kerja/ instansi pemerintah;
- ❖ Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria/indikator P2HAM karena faktor kurangnya anggaran;
- ❖ Masih adanya ketidaksesuaian indikator P2HAM dengan SOP di beberapa Unit kerja/Instansi Pemerintah; dan
- ❖ Pelaksanakan diseminasi dan penguatan pelayanan berbasis HAM bersamaan dengan kegiatan lain sehingga tidak maksimal dalam menjangkau UPT jaraknya jauh.

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan tindaklanjut hasil Diseminasi dan penguatan HAM menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan unit kerja yang menerapkan pelayanan publik yang berbasis HAM , terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM terhadap masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Meningkatkan Diseminasi dan Penguatan dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) secara langsung ke Unit Kerja/Instansi pemerintah;
- ❖ Keterlibatan Unit Pusat dalam memberikan Diseminasi dan penguatan kepada Unit kerja/Instansi pemerintah secara daring sebagai Narasumber Sosialisasi atau Bimtek;
- ❖ Meningkatkan dan atau melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang telah tersedia;
- ❖ Pencanaan Pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) oleh Unit kerja/Instansi pemerintah;
- ❖ Penyampaian data dukung sesuai kriteria pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) oleh Unit kerja/Instansi pemerintah yang menyampaikan; dan
- ❖ Monitoring dan evaluasi berkala Pimpinan Unit kerja/Instansi pemerintah yang telah melaksanakan tahap perencanaan dan pembangunan.

## Sasaran Kegiatan 2 Ditjen HAM

### Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat, dengan target sebesar 100%.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat tahun 2023 sudah tercapai karena sesuai dengan *timeline* pelaksanaan kegiatan sebanyak 17 layanan dilakukan sebagai kegiatan fasilitatif. Target yang ditetapkan untuk dikeluarkannya Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat adalah 100%, dengan realisasi tahun 2023 adalah 100%.

**Tabel III.16. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	100%	100%	100%

- ❖ Formulasi perhitungan Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah informasi dan dokumentasi HAM yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan masyarakat}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{17}{17} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Sampai dengan Desember tahun 2023 sudah terlaksana 12 bulan pelayanan informasi HAM yang terdiri dari 17 kategori layanan, yaitu: HAM highlight, berita, kegiatan, infografis, info kanwil, konten, data pengaduan ham, database Diseminasi dan Penguatan HAM, Database Kerjasama, Data KKP HAM, Data P2HAM, PPID, Produk Hukum, Dokumen JDIH, Perpustakaan, Data Keuangan, dan Data Kepegawaian.

Selain hal tersebut Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM menjalankan 1 (satu) kegiatan Utama yaitu Pelayanan Informasi HAM yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- Pengelolaan Data dan Informasi HAM
- Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### 1. Pengelolaan Data dan Informasi HAM

Pada tahap ini Dit. Fasilitasi dan Informasi HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka Penyusunan Profil Pembangunan HAM. Kegiatan dimulai dengan Konsultasi Profil Pembangunan HAM yang dilakukan sebagai bentuk *brainstorming* untuk menentukan arah Penyusunan Profil Pembangunan HAM 2023 termasuk didalamnya penentuan topik yang akan dianalisis. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah Pengumpulan Bahan Profil Pembangunan HAM yang pada tahun ini merujuk pada data verifikasi KKP HAM Tahun 2023. Kegiatan selanjutnya, dilakukan Pengolahan Bahan Profil Pembangunan HAM untuk melihat capaian pemenuhan HAM di masing-masing daerah. Pengolahan Bahan Profil Pembangunan HAM dilanjutkan dengan Verifikasi data Profil Pembangunan HAM. Pada tahapan ini, dilakukan *crosscheck* Kembali atas data yang telah diolah. Kegiatan terakhir merupakan Finalisasi Profil Pembangunan HAM 2023 yang menghasilkan analisis gap pemenuhan HAM dan rekomendasi bagi Pemda dan atau K/L terkait.

#### 2. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) terdapat beberapa kegiatan yang saling berkaitan, yaitu:

- Identifikasi Kebutuhan Sistem Informasi HAM

- Pengembangan Aplikasi Informasi HAM
- Pengelolaan Server dan Jaringan TIK
- Monitoring dan Evaluasi Informasi HAM

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat tahun 2023 sudah dapat dibandingkan karena data realisasi berupa layanan informasi dan dokumentasi HAM melalui website ham.go.id.

**Tabel III.17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 dan 2023 target tercapai 100%.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel III.18. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat dari tahun 2020-2022 selalu tercapai sesuai target. Bahkan untuk tahun 2023 sudah tercapai 100% dari awal tahun karena kegiatan bersifat layanan informasi dan dokumentasi HAM.

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM). Karena lebih spesifik memberikan layanan informasi dan dokumentasi HAM.

**5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat, antara lain:

- ❖ Telah disusunnya *roadmap* dalam penentuan target dan tujuan organisasi terhadap informasi dan dokumentasi yang akan digunakan oleh masyarakat;
- ❖ Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai *stakeholder*, baik internal Kemenkumham (Pusdatin) maupun eksternal (pihak ketiga) terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- ❖ Telah terbentuknya pembagian tugas dalam tim terhadap informasi dan dokumentasi yang akan digunakan oleh masyarakat;

- ❖ Melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan database, antara lain:
  - a. Pengembangan Aplikasi:
    - Beranggaran:
      - Sistem Informasi Pemajuan HAM (SIP HAM)
      - Website Direktorat Jenderal HAM 2.0
      - Sistem Informasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran HAM (SIMAS HAM 2.0)
      - Sistem Aplikasi Pemajuan Aksi (SAPA HAM)
      - Aplikasi Penilaian Resiko Bisnis dan HAM (Prisma 2.0)
    - Non Anggaran
      - Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)
      - Aplikasi Layanan Bagian UMUM (ALBUM)
  - b. Pengelolaan Aplikasi;
    - Sistem Aplikasi Pelayanan Informasi Hak Asasi Manusia (e-dashboard HAM)
    - Aplikasi Indeks Pemajuan HAM (IPH)
    - Sistem Monitoring Server
    - Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
    - Aplikasi Perpustakaan Digital
    - Aplikasi Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM
- ❖ Senantiasa Melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan dan server (jaringan LAN, wifi, dan server).

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- ❖ Perubahan Nomenklatur pada unit eselon II mengakibatkan perubahan kegiatan dimana kegiatan baru ini (Penyusunan Profil Pembangunan HAM) belum mempunyai *grand design* ataupun *roadmap*;
- ❖ Belum berubahnya Indikator Kinerja Utama Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM, sehingga menyebabkan antara target dan capaian tidak sesuai;
- ❖ Masih minimnya dukungan anggaran untuk menunjang sarpras dan pelaksanaan kegiatan;
- ❖ Adanya perubahan dalam penetapan spesifikasi aplikasi yang sedang dikembangkan;

- ❖ Masih minimnya SDM untuk menangani kejadian baik pengembangan maupun pengelolaan dibidang IT; dan
- ❖ Masih minimnya SDM untuk menangani kejadian baik pengembangan maupun pengelolaan dibidang IT serta dalam pengolahan data informasi HAM untuk mendukung pembentukan Profil Pembangunan HAM.

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan tingkat partisipasi, outcome terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Perlunya meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan berbagai *stakeholder* agar lebih konsisten dalam pengelolaan dan pengembangan Informasi dan dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat;
- ❖ Perlunya bimbingan teknis bidang pengolahan data dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- ❖ Mengusulkan penambahan dan peningkatan kualitas serta peremajaan sarana dan prasara IT yang sudah tidak layak pakai; dan
- ❖ Mengusulkan penambahan anggaran untuk meningkatkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta pengembangan dan pengelolaan TIK.

### Sasaran Kegiatan 3 Ditjen HAM

#### Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 100%.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti tahun 2023 sudah tercapai sebanyak 8 kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri. Target yang ditetapkan untuk dikeluarkannya Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti adalah 100%, dengan realisasi tahun 2023 adalah 100%.

**Tabel III.19. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

❖ Formulasi perhitungan Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah kerja sama HAM yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah kerja sama HAM yang dijangkau pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sampai dengan Desember tahun 2023 telah dilakukan kerja sama dengan mitra dalam negeri seperti ECPAT, Pertamina, Universitas Bina Nusantara, Institute Leimina, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta mitra luar negeri yaitu UNDP, UNICEF, FNF, dan

RWI telah ditindaklanjuti dengan baik, melalui berbagai program diantaranya tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel III.20. Daftar Kerja Sama yang ditindaklanjuti Ditjen HAM Tahun 2023**

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	UNDP, UNICEF, Pertamina dan Univ. Binus	Workshop Pengarusutamaan HAM dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana	20 Juni 2023	Jakarta
2.	FNF	Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM	Maret 2023	1. Gorontalo 2. Sulteng 1. Sulbar
3.	FNF	Workshop Pelayanan Publik Berbasis HAM	29 Maret 2023	Sulawesi Tengah
4.	UNICEF	Konsultasi Publik Stranas Bisnis dan HAM kepada Kelompok Anak dan Remaja	24 Mei 2023	Jakarta
5.	Institute Leimina	Workshop International terkait Literasi Keberagaman	Agustus 2023	Jakarta
6.	Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	Pengumpulan data indeks HAM melalui metode survey masyarakat	September 2023	Jakarta
7.	RWI	Pembangunan berkelanjutan yang menghormati hak asasi manusia, dan	Oktober 2023 - Maret 2023	Jakarta, Jawa Barat, Banten

		didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik		
8.	UNDP	Peluncuran Perpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM	November 2023	Jakarta

Sumber data: Laporan kinerja Dit. Kerja Sama

**Gambar III.1. Workshop Pengarusutamaan HAM dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana**



Sumber gambar: Facebook Ditjen HAM (Humas DJHAM)

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti sampai tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena realisasinya target sudah tercapai.

**Tabel III.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 dan 2023 realisasi capaian sama mencapai 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel III.22. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 diperoleh realisasi sebesar 200%, dimana hasil tersebut diperoleh dari capaian 4 dokumen kerja sama (1 dokumen kerja sama mitra dalam negeri dan 3 dokumen kerja sama mitra luar negeri) dari target 2 dokumen. Sedangkan tahun 2021-2023 diperoleh realisasi 100% secara berturut-turut.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM). Karena lebih spesifik berupa kerja sama HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti, antara lain:

- ❖ Kerja sama dapat ditindaklanjuti jika program Ditjen HAM sesuai dengan *concern* mitra kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri;

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- ❖ Proses pengesahan MoU yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kesepakatan kerja sama;
- ❖ Adanya perbedaan persepsi atas pandangan terhadap suatu isu atau program yang akan dijajaki; dan
- ❖ Pada pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri, dampak krisis global menjadi salah satu faktor menurunnya kerja sama dengan pihak luar.

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan kerja sama baik dengan mitra dalam maupun luar negeri. Outcome terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Banyaknya frekuensi koordinasi yang dilakukan akan meningkatkan jumlah kerja sama dalam dan luar negeri;
- ❖ Pelaksanaan monev secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan sehingga akan diketahui kendala dan hambatan; dan
- ❖ Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil monev yang akan memberikan dampak secara luas.

## Sasaran Kegiatan 4 Ditjen HAM

### Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM, dengan target sebesar 70%.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM tahun 2023 telah tercapai. Target yang ditetapkan untuk dikeluarkannya Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM adalah 70%, dengan realisasi rata-rata capaian Aksi HAM K/L/D Tahun 2023 adalah 81,72%.

**Tabel III.23. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	70%	81,72%	116,74%

- ❖ Formulasi perhitungan Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Rata – Rata Capaian Aksi HAM K, L, D} \\
 &\quad \text{memenuhi target periode B04 + B08 + B12}}{\sum 3 \text{ Periode Persentase Capaian Aksi HAM K, L, D} \\
 &\quad \text{memenuhi target}} \\
 &\quad \times 100\% \\
 \% &= \frac{92,28+78,34+74,54}{3} \times 100\% \\
 &= \mathbf{81,72\%}
 \end{aligned}$$

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi diperoleh dari capaian rata-rata K/L/D dibagi 3 periode capaian (B04/B08/B12). Sehingga hasil yang diperoleh seperti yang tergambar pada formulasi perhitungan di atas.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi telah tergambar secara utuh setelah pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM selesai dilaksanakan pada periode B12.

**Tabel III.24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	65%	77,71%	119,5%	70%	81,72%	116,74%

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel III.25. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pelaksanaan	75% (Pusat)	88,37% (Pusat)	60%	74,50%	65%	77,71%	70%	81,72%

Aksi HAM dalam RANHAM	30% (Daerah)	87,04% (Daerah)							
-----------------------	--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM pada tahun 2020 target antara Pusat dan Daerah masih dipisahkan dalam formulasi target dan perhitungannya. Sedangkan realisasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM).

#### 5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM, antara lain:

- ❖ Secara substansi data dukung aksi HAM yang dilaporkan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang ditetapkan pada Perpres 53/2021;
- ❖ Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memahami substansi dan melaksanakan aksi HAM yang telah ditetapkan;
- ❖ Dukungan pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan Perpres 53/2021 secara optimal; dan
- ❖ Unit dan organisasi di bawah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sinergis dalam melaksanakan Aksi HAM dan aktif berkoordinasi dengan Panitia Nasional RANHAM Pusat dan Daerah.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- ❖ Dalam pelaporan, masih banyak data dukung yang tidak memenuhi aspek administrasi. Sehingga, banyak aksi yang dilaporkan tidak mendapatkan nilai maksimal karena tidak memenuhi nilai administrasi;

- ❖ Masih kurangnya pemahaman dari para pelaksana pelaporan RANHAM terutama Pemerintah Daerah mengenai dokumen/data dukung yang menjadi aspek penilaian yang harus dilaporkan;
- ❖ Kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi sebelum dilakukannya pelaksanaan pelaporan Aksi HAM terutama kepada Pemerintah Daerah; dan
- ❖ Kurangnya komitmen tanggung jawab pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM yang merupakan kewajiban negara baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melihat masih ada yang tidak melaporkan dan/ melaksanakan aksi HAM dengan kurang optimal.

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan partisipasi, Outcome terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Menyiapkan aplikasi Monev SAPAHAM yang akan memfasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaporan Aksi HAM tahun 2023 menggantikan aplikasi Monev Kantor Staf Presiden;
- ❖ Perlu lebih massif dilaksanakannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pelaporan aksi HAM oleh Panitia Nasional RANHAM;
- ❖ Untuk meningkatkan jumlah partisipasi dan kualitas pelaporan aksi HAM, perlu komitmen dari pimpinan K/L/D dan pemahaman bahwa RANHAM bukanlah sekedar formalitas pembangunan HAM, namun dokumen politik HAM yang menjadi tolok ukur terhadap komitmen penyelenggara kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM; dan
- ❖ Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarunit di internal Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dengan target-target Ukuran Keberhasilan Aksi HAM, termasuk di dalamnya adalah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan Aksi HAM tahun berjalan.

## Sasaran Kegiatan 5 Ditjen HAM

### Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Persentase Kab/Kota Peduli HAM, dengan target sebesar 25%.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase Kab/Kota Peduli HAM tahun 2023 sudah tercapai. Target yang ditetapkan untuk diperolehnya Persentase Kab/Kota Peduli HAM adalah 25%, dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 52%. Dari total 514 Kab/Kota di Indonesia sebanyak 460 Kab/Kota yang melapor, dari 460 Kab/Kota yang melapor terdapat **267 Kab/Kota (52%) yang mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM**, 41 Kab/Kota (8%) yang mendapatkan kriteria cukup peduli, dan 71 Kab/Kota (14%) yang mendapatkan kriteria mulai peduli.

**Tabel III.26. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%	52%	208%

#### ❖ Formulasi perhitungan Persentase Kab/Kota Peduli HAM

$$\% = \frac{\sum \text{Juml kabupaten kota yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\sum \text{Total Jumla kabupaten kota}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{267}{514} \times 100\% \\ &= 52\% \end{aligned}$$

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi diperoleh dari jumlah Kab/Kota yang mendapatkan predikat Peduli HAM dibagi total jumlah

Kab/Kota di Indonesia. Sehingga hasil yang diperoleh seperti yang tergambar pada formulasi perhitungan di atas.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Kab/Kota Peduli HAM tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dapat diketahui bahwa Persentase Kab/Kota Peduli HAM, untuk tahun Tahun 2023 sesuai hasil rapat penilaian adalah 52% (267 Kab/Kota). Dan pada tanggal 10 Desember 2023, bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, Menteri Hukum dan HAM secara resmi memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat Peduli HAM.

**Tabel III.27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%	40,5%	203%	25%	52%	208%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan secara target, realisasi dan capaian pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022 ditargetkan 20% Kab/Kota Peduli HAM dan realisasinya adalah 40,5% sehingga capaiannya adalah 203%. Pada tahun 2023 ditargetkan 25% Kab/Kota peduli HAM sedangkan realisasinya adalah 52% sehingga capaiannya adalah 208%.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Kab/Kota Peduli HAM. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel III.28. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10%	59%	15%	KKP HAM tahun 2021 ditiadakan untuk sementara, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal HAM No HAM-HA.02.02-17 tanggal 28 Juli 2021 terkait Peniadaan Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) pada tahun 2021 yang disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui disposisi tanggal 26 Agustus 2021	20%	40,5%	25%	52%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target Persentase Kab/Kota Peduli HAM pada tahun 2021, pelaksanaan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM (KKP HAM) ditiadakan akibat pandemi Covid-19. Dalam hal ini anggaran terkait KKP HAM di Pusat terkena kebijakan revisi *Automatic Adjustment* penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase Kab/Kota Peduli HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM).

#### **5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Persentase Kab/Kota Peduli HAM, antara lain:

- ❖ Meningkatnya koordinasi antara Direktorat Jenderal HAM, Kanwil Kemenkumham, dan Pemda Provinsi/Kab/Kota dalam pelaksanaan KKP HAM;
- ❖ Adanya dukungan pimpinan Pemda Provinsi/Kab/Kota dalam pelaksanaan KKP HAM; dan
- ❖ Terlaksananya sinergitas antara Pemda Provinsi/Kab/Kota dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya dalam melaksanakan KKP HAM.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- ❖ Belum adanya nomenklatur terkait HAM pada Pemda Kab/Kota;
- ❖ Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan KKP HAM baik di Pusat maupun di Daerah;
- ❖ Secara substansi indikator yang ada pada Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang KKP HAM masih dianggap sulit untuk dilakukan pengumpulan data dukung dari OPD terkait. Disebabkan karena belum semua program yang dimiliki Pemda sejalan dengan indikator yang ada di dalam Permenkumham KKP HAM. Sehingga data dukung yang disampaikan tidak sesuai;
- ❖ Belum adanya pedoman substansi atas indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM karena SDM kanwil dan pemda tidak memahami substansi indikator dan tidak dapat melakukan pelaporan yang sesuai dengan aplikasi; dan
- ❖ Tidak terlaksananya bimbingan teknis kepada operator KKP HAM (Kanwil Kemenkumham) terkait aplikasi pelaporan KKP HAM sebelum dilakukannya pemeriksaan dan penginputan data dukung pelaporan KKP HAM; dan Kurangnya komitmen tanggung jawab pelaksanaan dan

pelaporan KKP HAM yang merupakan kewajiban negara baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melihat masih ada yang tidak melaporkan dan/ melaksanakan KKP HAM dengan optimal.

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan Persentase Kab/Kota Peduli HAM menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan partisipasi, Outcome terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Menyusun pedoman substansi atas indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM supaya SDM kanwil dan pemda dapat memahami substansi indikator dan dapat melakukan pelaporan yang sesuai dengan aplikasi;
- ❖ Melaksanakan bimbingan teknis kepada operator KKP HAM (Kanwil Kemenkumham) terkait aplikasi pelaporan KKP HAM;
- ❖ Melakukan pengembangan aplikasi pelaporan KKP HAM;
- ❖ Perlu lebih massif dilaksanakannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait indikator untuk memaksimalkan pelaksanaan KKP HAM;
- ❖ Untuk meningkatkan kualitas pelaporan KKP HAM perlu dilakukan peninjauan lapangan secara langsung;
- ❖ Untuk meningkatkan jumlah partisipasi KKP HAM, perlu komitmen dari pimpinan Pemerintah Daerah Kab/Kota; dan
- ❖ Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarunit di internal Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan OPD terkait dengan indikator-indikator pada KKP HAM.

## Sasaran Kegiatan 6 Ditjen HAM

### Tersedianya strategi Nasional Bisnis dan HAM

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, dengan target sebesar 1 Dokumen.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM tahun 2023 sudah tercapai berupa Dokumen Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Target yang ditetapkan untuk tercapainya Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM adalah 1 dokumen, dengan realisasi tahun 2023 adalah 1 dokumen Perpres.

**Tabel III.29. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

- ❖ Formulasi perhitungan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strateg Nasional Bisni dan HAM}}{\sum \text{Jumlah targe rekomendasi kebijakan Strategis Nasional Bisnis dan HAM}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realiasi yang dihasilkan adalah telah tersedianya Dokumen Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional

Bisnis dan HAM. Pada September 2023, 1 Dokumen RPerpres tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM telah **disahkan dan ditandatangani oleh Presiden menjadi Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM**. Selanjutnya, telah dilaksanakan juga Peluncuran Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada tanggal 6 November 2023 sekaligus Pengukuhan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM.

**Gambar III.2. Peluncuran Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Graha Pengayoman, Jakarta**



Sumber gambar: Facebook Ditjen HAM (Humas DJHAM)

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena ada perbedaan indikator kinerja kegiatan, dimana tahun 2022 indikator kinerja kegiatannya berupa **jumlah kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri dengan masing-masing target 1 dokumen**. Sedangkan pada tahun 2023 dengan indikator kinerja kegiatannya adalah **Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM dengan target 1 dokumen**. Oleh karena itu realisasi dan capaian tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023.

**Tabel III.30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi dan capaian IKK Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM antara tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan yang disebabkan karena adanya penyesuaian kode KRO/RO pada indikator kinerja kegiatan tahun 2022 dengan tahun 2023.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Realisasi kinerja pada indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra karena terdapat perbedaan yang disebabkan karena adanya penyesuaian nomenklatur KRO/RO pada tahun 2020 -2023.

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM).

**5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, antara lain:

- ❖ Adanya arahan Direktur Jenderal HAM yang menginstruksikan untuk dilakukan percepatan dalam penyusunan Rperpres Stranas Bisnis dan HAM agar implementasi Aksi Bisnis dan HAM dapat segera dilakukan.

- ❖ Rperpres Stranas Bisnis dan HAM masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023
- ❖ Sinergitas antara Kementerian/Lembaga dan Mitra Non Pemerintah sebagai Tim Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM berjalan baik.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- ❖ Adanya himbauan dari Kementerian Sekretariat Negara, agar Strategi Nasional Bisnis dan HAM dapat dikaji lagi sehingga dalam implementasinya nanti tidak justru menyebabkan penurunan investasi.
- ❖ Beberapa organisasi sipil masyarakat terkait Bisnis mengkhawatirkan jika regulasi ini justru akan memberatkan sektor usaha

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Analisis terhadap kegiatan ini menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan regulasi terkait Bisnis dan HAM di Indonesia, juga memberikan *outcome* terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi Bisnis dan HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Pembentukan tim percepatan penyusunan RPerpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM
- ❖ Pelaksanaan konsultasi publik untuk menjaring berbagai masukan dari berbagai kalangan dalam penyusunan RPerpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
- ❖ Peningkatan sinergitas dan koordinasi di antara Kementerian/Lembaga, mitra dan *stakeholder* terkait.

### Sasaran Kegiatan 7 Ditjen HAM

**Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 50%.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 sudah terlaksana sesuai dengan bisnis proses kegiatan penanganan dugaan pelanggaran HAM. Dari target yang ditetapkan sebesar 50%, sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sebesar 63,8%.

**Tabel III.31. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	63,8%	127,6%

- ❖ Formulasi perhitungan Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

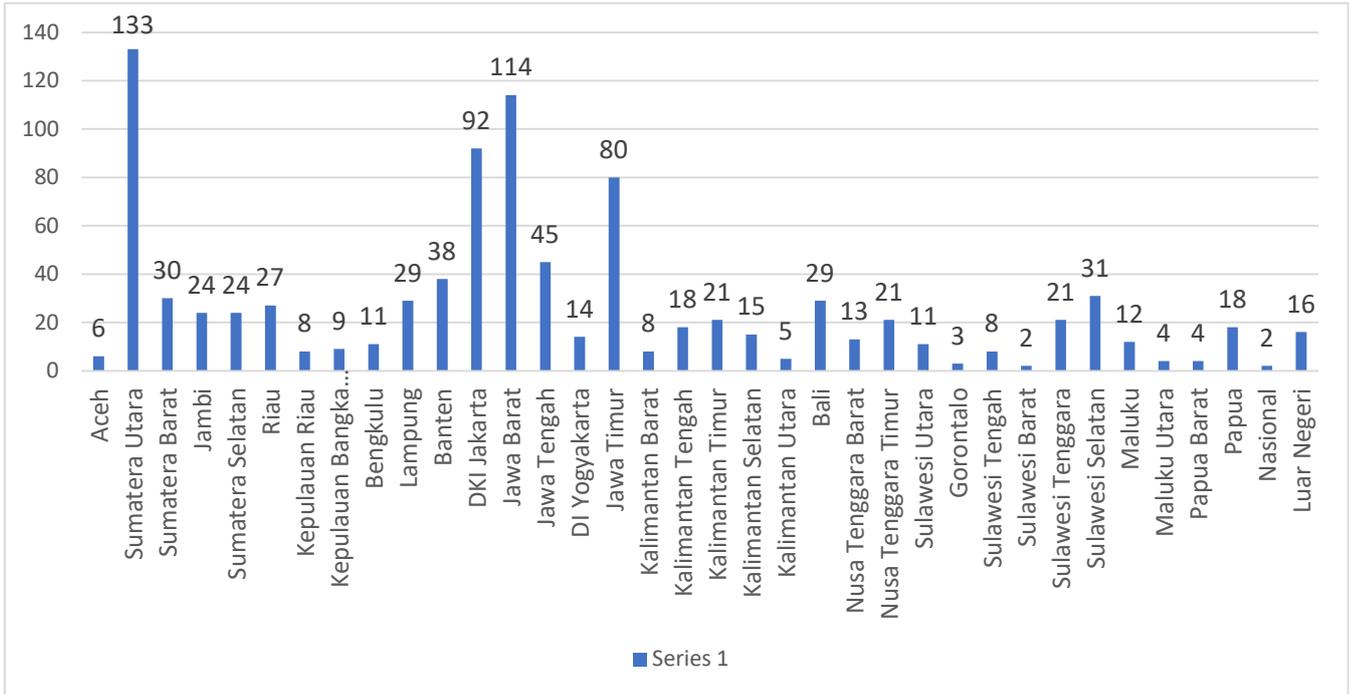
$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan}}{\sum \text{Total target dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{184}{288} \times 100\%$$

$$= 63,8\%$$

Pada bulan Januari-Desember 2023, Direktorat Yankomas telah menerima sebanyak 946 pengaduan, baik yang diajukan secara langsung maupun yang tidak diajukan secara langsung. Dari 946 jumlah pengaduan yang diterima, sebanyak 367 dugaan pelanggaran HAM langsung difile dikarenakan komunikasi tersebut hanya sebatas tembusan atau tidak termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. 168 pengaduan telah dilakukan telaah rekomendasi, 117 dugaan pelanggaran HAM dilakukan rekomendasi karena bersifat segera, 35 dugaan pelanggaran HAM telah ditelaah file, dan sebanyak 259 surat masih dalam proses penelaahan. Pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan telah mendapatkan tanggapan dari instansi terkait sebanyak 184. Berdasarkan total target capaian output Dit. Yankomas tahun 2023 yaitu sebanyak 288 penanganan, perlu dicapai capaian output sebanyak 144 tanggapan instansi (rumus perhitungan target caput ialah 50% dari total target 288 sama dengan 144 target caput). **Jadi capaian output pada tahun 2023 adalah 184/288=63,8%.** Adapun sebaran *locus* data pengaduan berdasarkan Provinsi dapat digambarkan pada grafik di bawah ini:

**Grafik III.1 Tindak Lanjut Komunikasi berdasarkan Locus Dugaan Pelanggaran HAM**



Sumber data: Laporan kegiatan penyusunan laporan komunikasi masyarakat Jan-Des 2023

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel III.32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	70%	140%	50%	63,8%	127,6%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang diterima pada tahun 2023 (dikomunikasikan dan belum/tidak dikomunikasikan) mengalami penurunan dari Tahun 2022. Penurunan jumlah dugaan pelanggaran HAM tersebut juga diikuti dengan penurunan jumlah tindak lanjut (telaah rekomendasi) yang dilakukan oleh Direktorat Yankomas.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

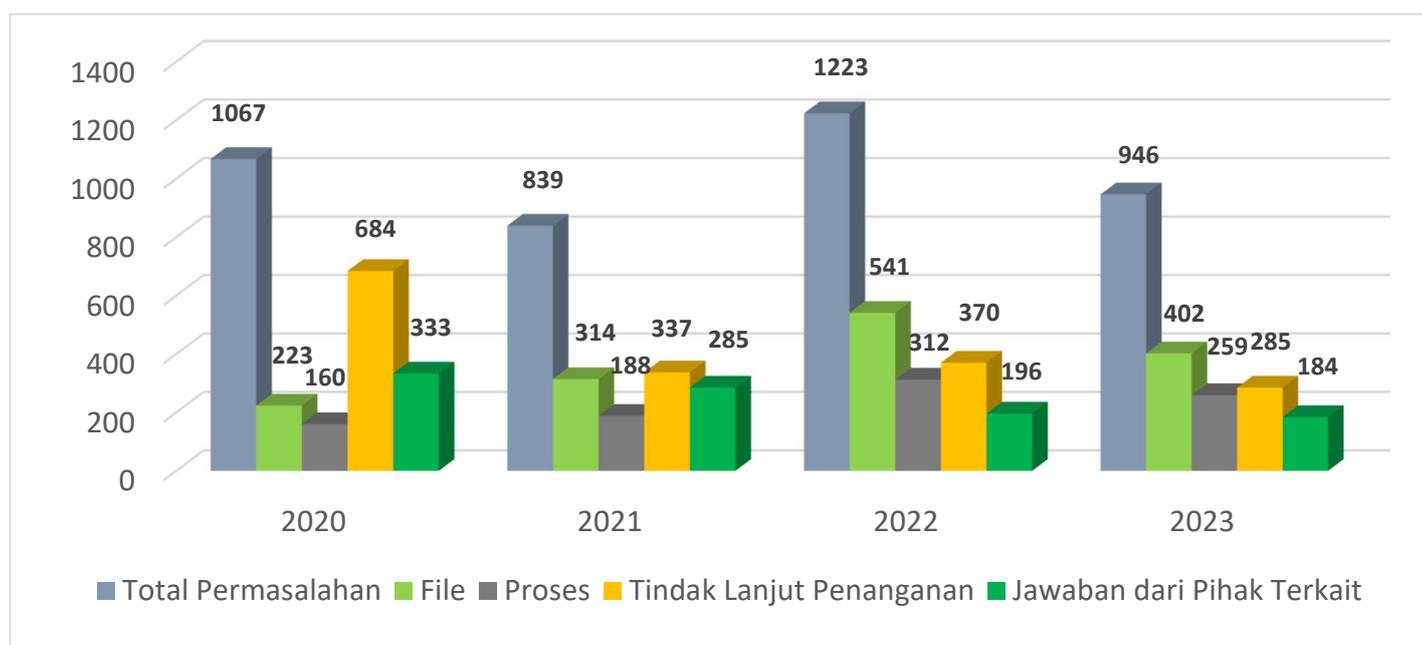
Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel III.33. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	138,75%	50%	75,60%	50%	70%	50%	63,8%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 selalu tercapai, namun mengalami penurunan. Adapun gambaran perbandingan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran pada tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Grafik III.2 Perbandingan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran HAM**



Sumber data: Laporan kegiatan penyusunan laporan komunikasi masyarakat Jan-Des 2023

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hanya dilakukan oleh Ditjen HAM (Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat).

#### **5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, antara lain:

- ❖ Pelaksanaan koordinasi dan klarifikasi dengan pemangku kepentingan melalui beberapa cara (surat, audiensi, FGD, koordinasi langsung dengan pemangku kepentingan) dan melibatkan kantor wilayah dalam upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM;
- ❖ Pemantauan terhadap laporan pengaduan yang sudah mendekati batas akhir waktu penanganan;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk percepatan penanganan dugaan pelanggaran HAM;
- ❖ Melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terkait dengan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM; dan
- ❖ Melakukan koordinasi dengan Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM dan Pusdatin terkait pengembangan aplikasi SIMASHAM.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- ❖ Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM berbeda di tingkat pusat dan wilayah karena Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM belum tersosialisasikan dengan baik di tingkat wilayah; dan
- ❖ Data pengaduan dugaan pelanggaran HAM belum dapat dikelola secara maksimal dan belum terintegrasi antara pengaduan di tingkat pusat dan daerah disebabkan karena Aplikasi Pengaduan HAM (SIMASHAM) masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendukung proses penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM berdasarkan

mekanisme yang ada pada Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan tingkat penanganan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM terhadap masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Perlu adanya updating data secara konsisten, khususnya setiap Triwulan, dan berkelanjutan sehingga dapat memonitor proses penanganan komunikasi masyarakat baik di tahun berjalan maupun tahun berikutnya sehingga tercipta data informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- ❖ Perlu adanya pemutakhiran pencatatan data penanganan komunikasi masyarakat yang tidak dilaksanakan secara manual melainkan secara sistem komputerisasi dengan tujuan mempermudah pengisian rekapitulasi data berdasarkan kategori yang disepakati serta mempermudah updating data penanganan komunikasi masyarakat yang belum bisa terselesaikan dan masih harus dimonitor proses penyelesaiannya.

### Sasaran Kegiatan 8 Ditjen HAM

#### Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial, dengan target sebesar 1 rekomendasi.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial tahun 2023 sudah tercapai. Dari target yang ditetapkan sebesar 1 rekomendasi, telah terealisasi sebesar 1 rekomendasi.

**Tabel III.34. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%

- ❖ Formulasi perhitungan Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu secara Non - Yudisial}}{\sum \text{Target rekomendasi dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu secara Non - Yudisial}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Direktorat Jenderal HAM telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor HAM-HA.01.04-21 tanggal 6 Juni 2023 yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan selaku Ketua Tim Pelaksana Tim Pemantau PPHAM, yang berisi tentang alur verifikasi yang mengatur kekuatan hasil verifikasi korban yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan Komnas HAM untuk menerbitkan surat keterangan korban bagi korban di luar negeri yang telah terverifikasi. Penerima surat keterangan korban kemudian ditetapkan oleh tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi PPHAM, dan diberikan layanan prioritas oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada semester kedua Direktorat Jenderal HAM terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non yudisial. Selain itu juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait proses verifikasi korban oleh Kementerian Luar Negeri dan pemberian prioritas layanan bagi korban dugaan pelanggaran HAM berat di luar negeri oleh Kementerian Hukum dan HAM.

**Gambar III.3. Dialog bersama perwakilan eks mahid**



Sumber gambar: Facebook Ditjen HAM (Humas DJHAM)

## **2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial I tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena realisasi telah tercapai pada semester I tahun 2023.

**Tabel III.35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian tahun 2022 dan tahun 2023 telah tercapai dengan realisasi rekomendasi berupa:

- ❖ Tahun 2022 telah dikeluarkan 1 (satu) rekomendasi terkait peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat di Aceh. Rekomendasi tersebut berisi daftar kebutuhan korban dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Aceh yaitu korban peristiwa Jambo Keupok (Kabupaten Aceh Selatan), Peristiwa Simpang KKA (Kabupaten Aceh Utara), dan Peristiwa Rumoh Geudong Kabupaten Pidie). Rekomendasi ditujukan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk kemudian agar ditindaklanjuti melalui rapat multilateral antar Kementerian/Lembaga. Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, yang meliputi, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
- ❖ Tahun 2023 telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Nomor HAM-HA.01.04-21 tanggal 6 Juni 2023 yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan selaku Ketua Tim Pelaksana Tim Pemantau PPHAM, yang berisi tentang alur verifikasi yang mengatur kekuatan hasil verifikasi korban yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan Komnas HAM untuk

menerbitkan surat keterangan korban bagi korban di luar negeri yang telah terverifikasi. Penerima surat keterangan korban kemudian ditetapkan oleh tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi PPHAM, dan diberikan layanan prioritas oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel III.36. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	30%	71,88%	1 Rekomendasi					

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial dari tahun 2021 sampai dengan 2023 selalu tercapai. Namun terdapat perbedaan pada target dan realisasi tahun 2020. Karena indikator kinerja kegiatannya berupa persentase korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu di Talangsari, Jambu Geupok, Simpang KAA, dan Rumoh Gedong yang menerima manfaat/memperoleh pemulihan.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial hanya dilakukan oleh Ditjen HAM (Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat).

#### **5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial, antara lain:

- ❖ Komitmen Presiden dan pimpinan organisasi untuk menyukseskan penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu secara non-yudisial;
- ❖ Adanya respon positif dari warga sebagai korban (penerima manfaat);
- ❖ Koordinasi yang efektif dan efisien dengan pemangku kepentingan, seperti dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Tim Pemantau Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat; dan
- ❖ Adanya dukungan anggaran atas pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu secara non-yudisial.

#### **6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Analisis kegiatan menitikberatkan untuk merekomendasikan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu secara Non-Yudisial menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat meningkatkan outcome, terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM terhadap masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Memperluas koordinasi dengan pemerintah daerah dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk pemutakhiran data korban dan ahli waris korban sebagai penerima manfaat;
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penanganan pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui non yudisial;
- ❖ Penyediaan regulasi atau kebijakan berkaitan dengan penanganan pelanggaran HAM Berat di masa lalu, karena Keputusan Presiden

- Nomor 4 Tahun 2023 akan berakhir pada 31 Desember 2023 sehingga perlu dirumuskan kebijakan lanjutannya; dan
- ❖ Sinkronisasi program dan anggaran pada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.

## Sasaran Kegiatan 9 Ditjen HAM

### Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu, Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM dengan target 109 instansi pemerintah, Jumlah kab/kota peduli HAM dengan target 57 instansi pemerintah, dan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM dengan target 33 instansi pemerintah.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada LKjIP Bidang HAM Kanwil (33 Kanwil) dapat diketahui bahwa target Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM, Jumlah kab/kota peduli HAM, dan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM tahun 2023 sudah tercapai. Dari target yang ditetapkan telah terealisasi seperti yang tergambar pada tabel berikut.

**Tabel III.37. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	109 Instansi Pemerintah	396 Instansi Pemerintah	363,3%
Jumlah kab/kota peduli HAM	57 Instansi Pemerintah	267 Instansi Pemerintah	468,42%
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	33 Instansi Pemerintah	240 Instansi Pemerintah	727,27%

- ❖ Formulasi perhitungan Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Pemda Prov Kab Kota yang berpartisipasi Pada program Aksi HAM}}{\sum \text{Target Pemda Prov Kab Kota yang melaksanakan program Aksi HAM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{396}{109} \times 100\%$$

$$= \mathbf{363,3\%}$$

- ❖ Formulasi perhitungan Jumlah kab/kota peduli HAM

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah kabupaten kota yang meraih predikat Peduli HAM}}{\sum \text{Target kabupaten kota pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{267}{57} \times 100\%$$

$$= \mathbf{468,42\%}$$

- ❖ Formulasi perhitungan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah unit kerja penerima P2HAM}}{\sum \text{Jumlah target instansi pemerintah pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{240}{33} \times 100\%$$

$$= \mathbf{727,27\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan target Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM pada LKjIP Bidang HAM Kanwil Kemenkumham, seperti tergambar pada tabel 3.37. Bahwa tahun 2023 dari masing-masing LKjIP Kanwil dapat diketahui terdapat 3 Pemda yang tingkat partisipasi pelaporan Aksi HAM nya tinggi yaitu, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Bahwa dalam rangka implementasi Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 perlu ditetapkan Kabupaten/Kota yang berpredikat Peduli HAM. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan penelaahan data oleh Tim Verifikasi dan Tim Penilai terhadap data penilaian implementasi HAM di Kab/Kota, melalui Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenkumham. Maka diterbitkanlah Kepmenkumham Nomor M.HH-03.HA.02.01.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Kab/Kota Peduli HAM pada Tahun 2022. Dengan hasil terdapat 267 Kab/Kota yang berpredikat Peduli HAM, 17 Pemerintah Provinsi yang membina dan membangun sebagian besar atau seluruh Kab/Kota Peduli HAM, dan 17 Kantor Wilayah yang mendorong sebagian besar atau seluruh Kab/Kota Peduli HAM.

Sedangkan dalam rangka implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 perlu ditetapkan Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan pengujian dan penilaian oleh Tim Penilai terhadap data verifikasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Maka diterbitkanlah Kepmenkumham Nomor M.HH-02.HA.02.01.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM. Dengan hasil terdapat 240 UPT dan 1 Unit Kerja Pusat di lingkungan Kemenkumham yang menerima predikat P2HAM.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM, Jumlah kab/kota peduli HAM, dan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemerintah	109	468	429,35	109	396	363,3%
Instansi	Instansi	Instansi	%	Instansi	Instansi	

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Pemerintah	Pemerintah		Pemerintah	Pemerintah	
Jumlah kab/kota peduli HAM	57 Instansi Pemerintah	170 Instansi Pemerintah	298,24 %	57 Instansi Pemerintah	267 Instansi Pemerintah	468,42%
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	33 Instansi Pemerintah	91 Instansi Pemerintah	275,75 %	33 Instansi Pemerintah	240 Instansi Pemerintah	727,27%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian tahun 2022 dan tahun 2023 telah tercapai dengan catatan bahwa Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM mengalami penurunan sedangkan terkait Jumlah Kab/Kota Peduli HAM dan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM, mengalami kenaikan yang signifikan. Realisasi tersebut merupakan capaian hasil perhitungan berdasarkan mekanisme penilaian yang ditetapkan dalam aturan.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM, Jumlah Kab/Kota Peduli HAM, dan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024. Karena ada perbedaan pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2020.

**Tabel III.39. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	-	-	109 Instansi Pemerintah	465 Instansi Pemerintah	109 Instansi Pemerintah	468 Instansi Pemerintah	109 Instansi Pemerintah	396 Instansi Pemerintah
Jumlah kab/kota peduli HAM	-	-	57 Instansi Pemerintah	Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2021 ditiadakan	57 Instansi Pemerintah	170 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	267 Instansi Pemerintah
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	-	-	33 Instansi Pemerintah	123 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	91 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	240 Instansi Pemerintah

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target 3 Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak dapat dibandingkan dari tahun 2020 karena adanya perbedaan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya. Sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 targetnya selalu tercapai, kecuali untuk Jumlah Kab/Kota Peduli HAM tahun 2021 tidak diperoleh realisasinya karena kegiatan tersebut ditiadakan.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM, Jumlah Kab/Kota Peduli HAM, dan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM hanya dilakukan oleh Ditjen HAM (Bidang HAM Kanwil Kemenkumham).

#### **5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

##### **a) Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM, antara lain:

- ❖ Pelibatan Peran Masyarakat Sipil dalam pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM dengan mengadakan *High Level Meeting* dan *Multi Stakeholder Forum*, melaksanakan bimtek dan penajaman Aksi HAM, Monev hasil pelaporan setelah periode verifikasi dan pembuatan Aplikasi SAPA-HAM;
- ❖ Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah terhadap permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi terkait Aksi HAM guna tetap mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian Aksi HAM, dalam hal ini Kantor Wilayah juga selalu melakukan komunikasi melalui surat notifikasi guna mengingatkan tenggang waktu pengumpulan data dukung terkait capaian Aksi HAM; dan
- ❖ Melaksanakan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya terkait pelaksanaan program aksi HAM oleh masing-masing instansi pemerintah.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada pemerintah daerah, antara lain:

- ❖ Masih terdapat pemahaman yang berbeda/salah pada substansi Aksi HAM sehingga menimbulkan multitafsir antar OPD;
- ❖ Mutasi penanggung jawab pelaporan di daerah;
- ❖ Belum adanya koordinasi efektif antara BAPPEDA dan Biro Hukum; dan
- ❖ Masa pelaporan aksi yang belum digunakan secara efisien oleh beberapa daerah sehingga ketika terjadi kendala teknis, daerah

kehilangan waktu untuk mengecek dan memasukkan data dengan benar.

#### **b) Jumlah Kab/Kota Peduli HAM**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Jumlah Kab/Kota Peduli HAM, antara lain:

- ❖ Peningkatan peran Kanwil, terutama Bidang HAM dalam mengawal dan memberikan supervisi kepada daerah di bawah koordinasinya;
- ❖ Adanya dukungan pimpinan Pemda Provinsi/Kab/Kota dalam pelaksanaan KKP HAM; dan
- ❖ Terlaksananya sinergitas antara Pemda Provinsi/Kab/Kota dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya dalam melaksanakan KKP HAM.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan KKP HAM antara lain:

- ❖ Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan data secara lengkap disebabkan salah satunya karena di dalam Permenkumham 22/2021 terdapat indikator-indikator baru. Hal ini mengakibatkan banyak Kabupaten/Kota yang belum memahami substansi dari indikator-indikator tersebut;
- ❖ Adanya pergantian operator maupun pejabat yang menangani RANHAM di Daerah sehingga membutuhkan waktu bagi pejabat maupun staff pengganti untuk menyesuaikan diri;
- ❖ Minimnya kadernisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga menyulitkan apabila terjadi pergantian petugas; dan
- ❖ Terjadi kesalahan operator yang ada di pemerintah Daerah dalam memahami ceklist dari data dukung KKP HAM sehingga apa yang diminta dan data yang ada kerap kali kurang maksimal.

**c) Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM, antara lain:

- ❖ Penyampaian Penyusunan panduan pendukung berupa Buku Petunjuk Pelaksanaan P2HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah dan memberikan pemahaman lebih mendalam bagi Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan tahap-tahap pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM dalam bentuk koordinasi dan konsultasi;
- ❖ Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM dilakukan secara efisien dengan membangun komunikasi antar pegawai maupun pejabat dilingkungan kerja dengan memanfaatkan teknologi, seperti WhatsApp Group dan rapat secara daring; dan
- ❖ Melakukan Bimbingan Teknis kepada seluruh Operator Unit Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham mengenai aplikasi pelayanan publik berbasis HAM.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- ❖ Diperlukan Bimtek kepada operator Unit Kerja/Instansi Pemerintah terkait perubahan Permenkumham P2HAM terutama terhadap indikator-indikator baru;
- ❖ Beberapa UPT masih dalam proses pembangunan, dimana data dukung yang diminta saat ini masih diupayakan berupa fasilitas yang dirasa memerlukan ruang dan biaya guna pengadaannya dimana kondisi Lapas dan Rutan yang saat ini mulai over kapasitas; dan
- ❖ Kualitas data yang dilampirkan masih belum maksimal sehingga menyebabkan pengurangan dalam penilaian.

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

### a) Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan Aksi HAM tahun 2023 menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan tingkat partisipasi, outcome terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap instansi Pemerintah Daerah yang sebelumnya telah melaksanakan program Aksi HAM agar untuk tahun selanjutnya dapat meningkatkan atau berpartisipasi sebagai instansi pemerintah yang ikut serta dalam program Aksi HAM;
- ❖ Melakukan pendekatan baik secara luring/daring dengan melaksanakan asistensi, bimtek serta komunikasi yang lebih aktif;
- ❖ Melakukan penguatan pada Panitia Nasional RANHAM dalam hal kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemantauan dan evaluasi RANHAM; dan
- ❖ Membuat pedoman terhadap substansi Aksi HAM yang lebih jelas dan tata kalimat yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, termasuk keterangan penilaian dari kriteria nilai pada skor penilaian Aksi HAM.

### b) Jumlah Kab/Kota Peduli HAM

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan KKP HAM menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan tingkat partisipasi, terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM terhadap masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Menyusun pedoman substansi atas indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM supaya SDM kanwil dan pemda dapat memahami substansi indikator dan dapat melakukan pelaporan yang sesuai dengan aplikasi;
- ❖ Melaksanakan bimbingan teknis kepada operator KKP HAM (Kanwil Kemenkumham) terkait aplikasi pelaporan KKP HAM;
- ❖ Melakukan pengembangan aplikasi pelaporan KKP HAM; dan

- ❖ Perlu lebih massif dilaksanakannya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait indikator untuk memaksimalkan pelaksanaan KKP HAM.

**c) Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM**

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan tindaklanjut hasil Diseminasi dan penguatan HAM menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan unit kerja yang menerapkan pelayanan publik yang berbasis HAM , terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM terhadap masyarakat. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Melaksanakan rapat koordinasi terkait implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang P2HAM dengan seluruh Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- ❖ Penyampaian data dukung sesuai kriteria pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) oleh Unit kerja/Instansi pemerintah yang menyampaikan; dan
- ❖ Monitoring dan evaluasi berkala Pimpinan Unit kerja/Instansi pemerintah yang telah melaksanakan tahap penancangan dan pembangunan.

## Sasaran Kegiatan 10 Ditjen HAM

### Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah dengan target 99 rekomendasi.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada LKjIP Bidang HAM Kanwil Kemenkumham dapat diketahui bahwa target Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah tahun 2023 telah tercapai. Dari target yang ditetapkan sebesar 99 rekomendasi telah terealisasi sebesar 188 rekomendasi seperti yang tergambar pada tabel berikut.

**Tabel III.40. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	99 Rekomendasi	188 Rekomendasi	189,89%

- ❖ Formulasi perhitungan Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah}}{\sum \text{Target Rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{188}{99} \times 100\% \\ &= 189,89\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan target Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah, tahun 2023 telah tercapai sebesar 188 rekomendasi (189,89%).

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.41. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	100%	99 Rekomendasi	188 Rekomendasi	189,89 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian tahun 2023 sudah terlaksana pada masing-masing Bidang HAM Kanwil Kemenkumham dan melebihi target dibandingkan dengan tahun 2022.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024. Karena ada perbedaan pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2020.

**Tabel III.42. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	-	99 Reko mend asi	99 Rekome ndasi	99 Reko mend asi	99 Rekome ndasi	99 Reko mend asi	188 Rekome ndasi

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak dapat dibandingkan dari tahun 2020 karena adanya perbedaan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya. Sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 targetnya selalu tercapai.

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah hanya dilakukan oleh Ditjen HAM (Bidang HAM Kanwil).

**5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah, antara lain:

- ❖ Adanya upaya koordinasi yang dilakukan Bidang HAM Kanwil dengan instansi terkait di wilayah dan Direktorat Yankomas dengan Kementerian/Lembaga terkait di Pusat sehingga lebih cepat dalam mendapatkan tanggapan dari instansi terkait;
- ❖ Pemberdayaan aplikasi/teknologi informasi yang menunjang kegiatan yang bersifat koordinatif dengan pihak terkait;
- ❖ Sikap kooperatif dari pihak terkait yang mengadukan permasalahan, sehingga proses penelaahan kasus sampai dengan terbitnya hasil rekomendasi dapat berjalan dengan baik; dan

- ❖ Kecepatan dan ketepatan Kantor Wilayah dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui aplikasi SIMASHAM, sehingga pengaduan segera dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:

- ❖ Adanya instansi terkait yang belum merespon rekomendasi dugaan pelanggaran HAM dengan cepat dan respon; dan
- ❖ Masih banyak *feature* yang perlu disempurnakan di dalam aplikasi SIMAS HAM, sehingga belum secara efektif diterapkan semua Bidang HAM Kanwil Kemenkumham.

## 6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Analisis kegiatan menitik beratkan untuk merekomendasikan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan jumlah rekomendasi, outcome terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya substansi P5HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Membangun koordinasi dan kerja sama yang masif dan terstruktur dengan instansi lain (Pusat maupun Daerah) sehingga mempermudah tindak lanjut/penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berhubungan dengan instansi dimaksud; dan
- ❖ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMASHAM, baik yang berbasis web maupun android, sebagai sarana untuk meningkatkan koordinasi antara Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan Bidang HAM Kanwil Kemenkumham dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM.

## Sasaran Kegiatan 11 Ditjen HAM

### Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu, Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 90%.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti tahun 2023 sudah tercapai mulai dari proses koordinasi dan pemetaan Peraturan perundang-undangan, analisa dan penelaahan peraturan perundang-undangan, serta tahap finalisasi rekomendasi peraturan perundang-undangan pada hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak kelompok rentan. Target yang ditetapkan untuk diperolehnya Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti adalah 90% dari 9 (sembilan) rekomendasi, dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 9 rekomendasi (100%).

**Tabel III.43. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%

❖ Formulasi perhitungan Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi PUU dan/atau RPUU berpersepektif HAM yang dikeluarkan}}{\sum \text{Jumlah target rekomendasi PUU dan/atau RPUU berpersepektif HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{9}{9} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 Direktorat Instrumen HAM telah melakukan analisa dan rekomendasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan berupa Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri dari berperspektif HAM antara lain:

No	Nama Rancangan PUU	Instansi Pemrakarsa	Progres
1	RUU Pengelolaan Ruang Udara	Kemhan RI	Telah disampaikan Surat Rekomendasi pada Tanggal 13 September 2023 Nomor Surat HAM.1-HA.04.01-46 kepada Kepala Biro Perundang-undangan Kementerian Pertahanan RI dan telah ditindaklanjuti melalui surat dari Biro Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertahanan tanggal 21 Desember 2023 dengan Nomor: B/2480/XII/2023/Roturdang
2	RPP tentang Pelindungan Jaksa dan Keluarga	Kejaksaan RI	Telah disampaikan Surat Rekomendasi pada Tanggal 11 September 2023 Nomor Surat HAM.1-HA.04.01-45 kepada Kejaksaan Agung RI dan telah ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung RI pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Nomor: B-334/C.7/Chk.1/12/2023
3	Peraturan Menteri Pendidikan,	Kemendikbud	Telah disampaikan Surat Rekomendasi pada Tanggal

	Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran		13 September 2023 Nomor Surat HAM.1-HA.04.01-47 kepada Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan dan telah ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor: 1130/A5/HK.02/2024
4	Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Masyarakat Adat	Kemendikbud	Telah disampaikan Surat Rekomendasi pada Tanggal 6 Desember 2023 Nomor Surat HAM.1-HA.04.03-73 kepada Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan dan telah ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tanggal 17 Desember 2023 dengan Nomor: 2258/F2/KB.07.05/2023
5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor ..... Tahun .....tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja Dalam Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Kemenaker	Telah disampaikan Surat Rekomendasi pada Tanggal 6 Desember 2023 Nomor Surat HAM.1-HA.04.03-74 kepada Kepala Biro Hukum dan telah ditindaklanjuti oleh Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor: B-1/2239/HK.12/XII/2023
6	Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia		

	Nomor ..... Tahun tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas		
7	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Satuan Pendidikan.	Kemenag RI	Telah disampaikan Surat Rekomendasi pada Tanggal 27 Juni 2023 Nomor Surat HAM.1-HA.04.03-34 kepada Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI dan telah ditindak lanjuti melalui Surat dari Biro Hukum Kemenag RI tanggal 26 Oktober 2023 dengan nomor B-195.56/SJ/B.V/2/HK.00.4/10/2023
8	RUU Masyarakat Hukum Adat	Kemendagri	Telah disampaikan Surat Rekomendasi pada Tanggal 28 Agustus 2023 nomor surat HAM.1-HA.04.01-41 kepada Kepala Biro Hukum Kemendagri dan telah ditindak lanjuti melalui Surat dari Biro Hukum Kemendagri tanggal 20 November 2023 dengan nomor surat 100.4.2.1/1942/Biro Hukum.
9	Rancangan PP tentang layanan Hak dan Kewajiban Warga Binaan, Tahanan dan anak di lembaga pemasyarakatan	Ditjen Pas Kemenkumham	Telah disampaikan Surat Rekomendasi pada Tanggal 18 Oktober 2023 nomor surat HAM.5-HA.04.01-25 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan telah ditindak lanjuti melalui Surat dari Ditjen PAS tanggal 7 November 2023 dengan nomor PAS.1-UM.01.01-1211

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 9 target rekomendasi telah seluruhnya tercapai dan ditindaklanjuti oleh *stakeholder* instansi pemrakarsa masing-masing.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti tahun 2023 dapat dibandingkan dengan data tahun sebelumnya.

**Tabel III.44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	80%	88,8%	111%	90%	100%	111,11%

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa realisasi tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	60%	75%	70%	100%	80%	88,8%	90%	100%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti dari tahun 2020-2023 selalu tercapai melebihi target.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena spesifik Ditjen HAM yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut (Dit. Instrumen HAM).

#### **5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti, antara lain:

- ❖ Secara aktif melakukan koordinasi antar pegawai dengan melakukan rapat baik daring maupun secara luring (tatap muka), serta selalu melakukan koordinasi sebelum dan sesudah kegiatan.
- ❖ Adanya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan baik di K/L dalam upaya proses analisa dan penyusunan rekomendasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM.
- ❖ Memaksimalkan anggaran yang ada dengan menyelenggarakan rapat non anggaran dan memaksimalkan koordinasi via luring.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti antara lain:

- ❖ Adanya kesulitan untuk mendapatkan draf rancangan peraturan perundang-undangan dari K/L pemrakarsa.
- ❖ Adanya 2 regulasi yang dijadikan acuan/pedoman dalam melakukan analisis peraturan perundang-undangan dari perpektif HAM yaitu Permenkumham 24/2017 tentang pedoman materi muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri nomor 20 dan 77 Tahun 2021 tentang Parameter HAM dalam pembentukan produk Hukum Daerah.
- ❖ Masih kurangnya pemahaman K/L pemrakarsa terhadap Permenkumham 24/2017.

- ❖ Belum seragamnya format analisis rekomendasi peraturan-perundang-undangan dari perspektif HAM baik tingkat pusat maupun daerah.
- ❖ Minimnya anggaran sehingga pelaksanaan pendampingan, pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan analisis peraturan-perundang-undangan belum bisa dilakukan secara optimal.

## **6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Analisis kegiatan menitikberatkan untuk merekomendasikan pelaksanaan Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan tingkat partisipasi, outcome terutama lebih dalam lagi memberikan *impact* bagi terpenuhinya kebijakan berperspektif HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Adanya dukungan anggaran bagi kegiatan bimtek terkait analisis peraturan-perundang-undangan (PUU) dari perpektif HAM dengan mengacu pada Permenkumham No 24/2017 direncanakan dan disusun secara matang sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.
- ❖ Perlunya terlibat aktif pendampingan dalam rapat-rapat pembahasan K/L untuk memberikan pendampingan dan masukan rekomendasi hasil analisis PUU dari perspektif HAM dan memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.
- ❖ Perlu adanya kewajiban keterlibatan yang mengikat antara Perancang pada K/L/D, dengan Ditjen HAM untuk melibatkan Ditjen HAM, baik dalam memberikan draft Rancangan PUU ataupun keterlibatan dalam proses rapat pembahasan.

## Sasaran Kegiatan 12 Ditjen HAM

**Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada  
Direktorat Jenderal HAM**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu, Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Jumlah Layanan Internal, dan Jumlah Layanan Perkantoran dengan target masing-masing sebesar 1 layanan.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Jumlah Layanan Internal, dan Jumlah Layanan Perkantoran tahun 2023 telah terlaksana dan tercapai karena sifat kegiatannya berupa dukungan fasilitatif. Target yang ditetapkan untuk tercapainya Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Jumlah Layanan Internal, dan Jumlah Layanan Perkantoran tahun 2023 adalah telah tercapai dengan masing-masing realisasi sebesar 1 layanan.

**Tabel III.46. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan  
Ditjen HAM Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100%
Jumlah Layanan Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

❖ Formulasi perhitungan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I}}{\sum \text{Target layanan dukungan manajemen Eselon I}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

❖ Formulasi perhitungan Jumlah Layanan Internal

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah layanan internal}}{\sum \text{Target layanan internal}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

❖ Formulasi perhitungan Jumlah Layanan Perkantoran

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah layanan perkantoran}}{\sum \text{Target layanan perkantoran}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan target dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 seluruh target telah tercapai masing-masing sebesar 1 layanan (100%).

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Jumlah Layanan Internal, dan Jumlah Layanan Perkantoran sampai tahun 2023 sudah dapat dibandingkan seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.47. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah	1	1	100%	1	1	100%

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	Layanan		Layanan	Layanan	
Jumlah Layanan Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian tahun 2023 sudah tercapai dan pelaksanaan progres kegiatan telah sepenuhnya terlaksana yang meliputi 14 KRO-RO antara lain:

- ❖ EBA-965-Layanan BMN (Layanan);
- ❖ EBA-958-Layanan Hubungan Masyarakat (Layanan);
- ❖ EBA-959-Layanan Protokoler (Layanan);
- ❖ EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan);
- ❖ EBA-962-Layanan Umum (Layanan);
- ❖ EBA-994-Layanan Perkantoran Ditjen HAM (Layanan);
- ❖ EBB-951-Layanan Sarana Internal (Unit);
- ❖ EBB-971-Layanan Prasarana Internal (Unit);
- ❖ EBC-954-Layanan Manajemen SDM (Orang);
- ❖ EBD-952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen);
- ❖ EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen);
- ❖ EBD-955-Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen);
- ❖ EBD-961-Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen); dan
- ❖ EBD-974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen).

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Jumlah Layanan Internal, dan Jumlah Layanan Perkantoran. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan sampai dengan tahun 2020 sesuai dokumen Renstra Ditjen HAM 2020-2024.

**Tabel III.48. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen HAM Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan							
Jumlah Layanan Internal	1 Layanan							
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan							

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terkait realisasi target Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Jumlah Layanan Internal, dan Jumlah Layanan Perkantoran yang ditindaklanjuti dari tahun 2020-2023 selalu tercapai karena indikator kinerja kegiatan bersifat fasilitatif mendukung tercapainya kegiatan Direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal HAM.

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Jumlah Layanan Internal, dan Jumlah Layanan Perkantoran bersifat fasilitatif hanya mendukung tercapainya kegiatan di Direktorat Jenderal HAM.

**5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Hasil evaluasi keberhasilan dan/atau peningkatan pengukuran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Jumlah Layanan Internal, dan Jumlah Layanan Perkantoran, antara lain:

- ❖ Kebijakan Pimpinan Tinggi yang senantiasa memberikan arahan, petunjuk dan pengambilan keputusan yang tepat;
- ❖ Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat dan Direktorat Teknis dalam menjalankan kegiatan; dan

- ❖ Penggunaan aplikasi penunjang berjalannya pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Teknis seperti aplikasi ALBUM terkait penyediaan Ruang Rapat, ATK dan layanan BMN dan aplikasi lainnya yang mendukung kegiatan pada Direktorat Jenderal HAM.

Sedangkan penyebab kegagalan dan/atau penurunan kinerja sehingga menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:

- ❖ Pertanggungjawaban kegiatan belum sepenuhnya sesuai SOP, kurang lengkap dan tidak sesuai peraturan yang berlaku sehingga proses nya terhambat;
- ❖ Masih kurangnya SDM menyebabkan adanya kelebihan beban kerja pegawai; dan
- ❖ Belum tertibnya Unit teknis dalam menyampaikan laporan sehingga Kurang optimalnya Pelaporan dan Penilaian Pelaporan.

## **6. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Analisis kegiatan menitikberatkan untuk merekomendasikan pelaksanaan pengukuran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Jumlah Layanan Internal, dan Jumlah Layanan Perkantoran menjadi lebih baik lagi. Dengan harapan dapat memperbaiki/meningkatkan kinerja organisasi, outcome terutama memberikan *impact* bagi terpenuhinya dukungan fasilitatif di Direktorat Jenderal HAM. Rekomendasi tersebut antara lain:

- ❖ Melakukan sosialisasi secara massif terkait SOP baik dalam pertanggungjawaban keuangan, laporan maupun dukungan kesekretariatan lainnya;
- ❖ Mengajukan usulan kebutuhan pegawai ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk jangka waktu 5 tahun; dan
- ❖ Mengoptimalkan aplikasi penunjang sehingga dukungan fasilitatif dapat berjalan dengan baik.

### III.2. Realisasi Anggaran

Tabel III.49. Realisasi Anggaran Direktorat Jendral HAM Tahun 2023

Unit	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Diseminasi dan Penguatan HAM	1.042.990.000	1.022.505.635	98,04%
Fasilitasi dan Informasi HAM	794.356.000	782.262.636	98,48%
Kerja Sama HAM	2.480.829.000	2.419.887.392	97,54%
Pelayanan Komunikasi Masyarakat	2.152.682.000	2.063.441.935	95,85%
Instrumen HAM	2.447.618.000	2.393.216.535	97,78%
Sekretariat Ditjen HAM	52.285.806.000	51.161.592.028	97,85%
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	8.631.741.000	8.548.245.699	99,03%
<b>Direktorat Jendral HAM</b>	<b>69.836.022.000</b>	<b>68.391.151.860</b>	<b>97,93%</b>

Sumber data: Aplikasi SAKTI Kemenkeu

Grafik III.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Jendral HAM Tahun 2022-2023

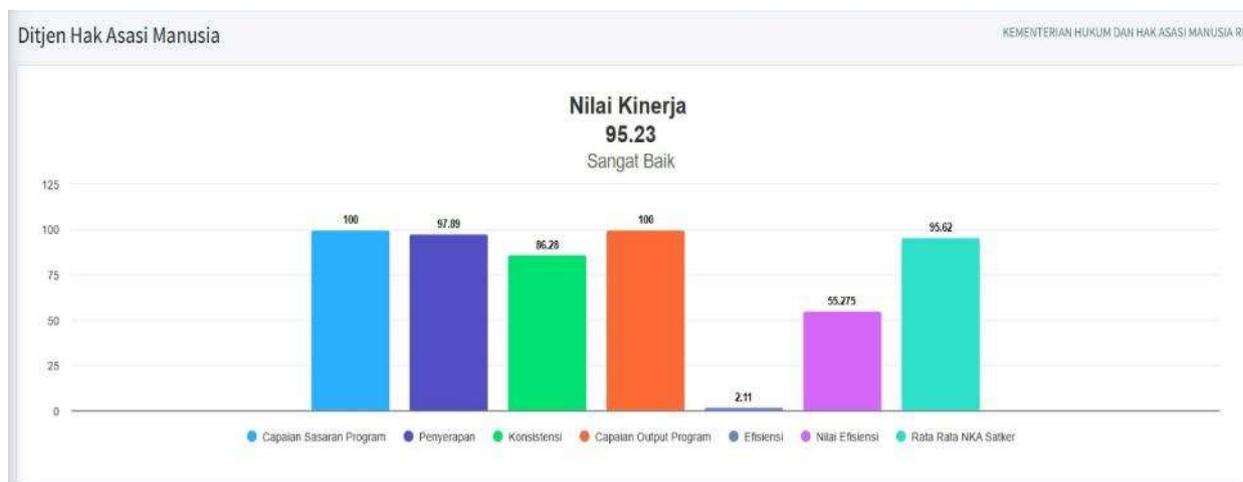


Sumber data: Aplikasi SAKTI Kemenkeu

### III.3. Capaian Kinerja Anggaran

#### 1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Nilai SMART DJA Direktorat Jenderal HAM Tahun Anggaran 2023 sebesar 95,23 (Cut Off tanggal 15 Januari 2024)



Sumber data: Aplikasi SMART DJA Kemenkeu

#### 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal HAM Tahun Anggaran 2023 sebesar 93,01 (Cut Off tanggal 4 Januari 2024)

Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
DIREKTORAT JENDERAL HAM	Nilai	100.00	68.04	86.78	96.31	100.00	92.14	100.00	100.00	93.01	100%	93.01
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10.00	6.80	17.36	9.63	10.00	9.21	5.00	25.00			
	Nilai Aspek	84.02		95.05					100.00			

Sumber data: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu



## 2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, Direktorat Jenderal HAM mengampu 4 (empat) Target Kinerja di tingkat Pusat dan 3 (tiga) Target Kinerja di tingkat Wilayah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Target Kinerja tahun 2023 dari 4 Target Kinerja Pusat tidak semuanya mendapatkan nilai maksimal. Hal ini dikarenakan ada data dukung yang kurang tercukupi. Demikian juga untuk Tingkat Wilayah ada beberapa yang tidak mendapatkan nilai maksimal karena tidak tercukupinya data dukung. Hal ini tentu memerlukan dari koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Bidang HAM Kanwil.

### a. Capaian Tarja Aksi HAM Pusat dan Daerah Periode TW I sampai dengan TW IV

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T23-B01	1. Pembentukan Tim Koordinasi Strategis monitoring dan evaluasi RANHAM sebagai Prioritas Nasional 2. Persiapan Rekrutmen Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RANHAM	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa: 1. SK Tim Koordinasi Strategis monitoring dan evaluasi RANHAM sebagai Prioritas Nasional. 2. Surat Undangan Rapat Persiapan 3. Rekrutmen Konsultan RANHAM 4. Notula Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B01 TARJA DIT. KERJA SAMA.zip</li> </ul> 	Terverifikasi
T23-B02	1. Penajaman Aksi HAM K/L 2. Tersedianya Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RANHAM	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa : 1. Surat Undangan Penajaman Aksi HAM K/L (Pra Penajaman Online "pelaksanaan direkomendasikan untuk persiapan rapat penajaman") 2. Notula 3. SK Penunjukan Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi RANHAM Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B02. TARJA DIT. KERJA SAMA.zip</li> </ul> 	Terverifikasi
T23-B03	1. Penajaman Aksi HAM K/L 2. Pendampingan dan Konsultasi Aksi HAM K/L/D	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa: 1. Surat Undangan Penajaman Aksi HAM K/L 2. Notula 3. Aksi HAM dan Target Capaian K/L 4. Berita Acara Pendampingan dan Konsultasi Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B03 TARJA DIT. KERJA SAMA.zip</li> </ul> 	Terverifikasi
T23-B04	1. Notifikasi pelaporan Aksi HAM B04 untuk K/L/D 2. Rapat Persiapan Verifikasi Aksi HAM B04	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa: 1. Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B04 untuk K/L/D 2. Undangan 3. ToR 4. Daftar Hadir 5. Notula Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Surat Notifikasi KL_B04.pdf</li> <li>1.b. Surat Notifikasi + Pengantar Format AHAMDA.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B05	1. Bimtek Pedoman Pelaporan Aksi HAM Daerah (Persiapan pelaporan B06) 2. Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B04	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa: B05 : 1. Laporan Bimtek Pedoman Pelaporan Aksi HAM Daerah yang memuat: a. Undangan/Surat Tugas b. Bahan paparan c. Notula d. Dokumentasi 2. Laporan Pelaksanaan Aksi HAM K/L/D B04 3. Daftar Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B04 Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Laporan BIMTEK SUMUT 14-16 MARET 2023-Fix.pdf</li> <li>1.b. SP_BIMTEK_SUMUT.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B06	Penyusunan dokumen capaian B04 Aksi HAM K/L/D	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Surat Capaian dan hasil penilaian Aksi HAM B04 K/L/D (catatan: Surat capaian untuk K/L sudah selesai menunggu td pimpinan Ditjen HAM selaku Sekretaris Panitia Nasional RANHAM) Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Draft SURAT CAPAIAN AKSI HAM B04 KL - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).pdf</li> <li>2. SURAT CAPAIAN AKSI HAM B04 PROVINSI KALBAR.pdf</li> </ul>	Terverifikasi

T23-B07	<p>1. Rapat Persiapan Verifikasi Aksi HAM B04</p> <p>2. Monitoring Capaian Target Aksi HAM</p>	95	<p>Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa: 1. Rapat Persiapan Verifikasi Aksi HAM B04 2. Monitoring Capaian Target Aksi HAM</p> <p>Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai namun untuk lampiran dokumentasi tidak ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. RAPAT PERSIAPAN VERIFIKASI AKSI HAM B04.pdf</li> <li>1.b. Daftar Masalah Pelaporan Aksi HAM.pdf</li> <li>2. MONEV SUMSEL.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B08	<p>1. Notifikasi pelaporan Aksi HAM B08 untuk K/L/D</p> <p>2. Pendampingan dan Konsultasi Aksi HAM K/L/D</p>	100	<p>Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa: 1. Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B08 untuk K/L/D 2. Berita Acara Pendampingan dan Konsultasi</p> <p>Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. K/L_Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B08 2023.pdf</li> <li>2. Karwil_Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B08 2023.pdf</li> <li>3. BA Pendampingan Konsultasi RANHAM.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B09	<p>Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B08</p>	100	<p>Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai Namun untuk hasil rekapitulasi belum dapat dilaksanakan dikarenakan kendala pada aplikasi SAP/HAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarja B09 - Laporan Hasil Pelaksanaan AKSI HAM K/L/D B08 2023.pdf</li> <li>Draft Surat Keterangan Tarja B09.doc</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B10	<p>1. Penyusunan dokumen capaian B08 Aksi HAM K/L/D</p> <p>2. Monitoring Capaian Target Aksi HAM</p>	100	<p>Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa 1. Surat Capaian dan hasil penilaian Aksi HAM B08 K/L/D 2. Daftar Masalah Pelaporan Aksi HAM</p> <p>Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. SURAT CAPAIAN AKSI HAM B08 KL.pdf</li> <li>1.b. SURAT CAPAIAN AKSI HAM B08 DAERAH (Karwil).pdf</li> <li>1.c. SURAT CAPAIAN AKSI HAM B08 DAERAH (Pemprov).pdf</li> <li>2. Daftar Inventarisir Masalah Hasil Monev Aksi HAM B08.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B11	<p>1. Notifikasi pelaporan Aksi HAM B12 untuk K/L/D</p> <p>2. Rapat Persiapan Verifikasi Aksi HAM B12</p>	100	<p>Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa 1. Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B12 untuk K/L/D 2. Undangan 3. Daftar Hadir 4. Notula</p> <p>Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Notifikasi Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM B12 Tahun 2023.pdf</li> <li>2. UANG Persiapan Verif Aksi HAM B12.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B12	<p>1. Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B12</p> <p>2. Penyusunan dokumen capaian B12 Aksi HAM K/L/D</p> <p>3. Rapat persiapan penyusunan laporan Presiden Aksi HAM 2022</p>	100	<p>Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa: 1. Laporan a. Pelaksanaan Aksi HAM K/L/D B12 b. Daftar Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D B08 2. Surat Capaian dan hasil penilaian Aksi HAM B12 K/L/D - Undangan - Daftar Hadir - Notula 3. Laporan Presiden Aksi HAM 2022</p> <p>Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Link Daduk Tarja Di: KS B12.docx</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi

b. Capaian Tarja Diseminasi 10 Hak Dasar Periode TW I sampai dengan TW IV

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T23-B01	1. Evaluasi bahan/instrumen Diseminasi 2. Dapat penyusunan bahan/ instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa: 1. Laporan Hasil Evaluasi bahan/instrumen Diseminasi 2. Laporan hasil rapat penyusunan bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B01-1. Hasil Evaluasi Bahan Diseminasi pdf</li> <li>B01-2. Laporan Hasil Rapat Penyusunan Bahan Diseminasi HAM pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B02	1. Pembentukan Tim Penyusunan Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia 2. Inventarisasi Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa: 1. Surat Keterangan Tim Penyusunan Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia 2. Hasil Inventarisasi Bahan /instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B02-1. SK Tim pdf</li> <li>B02-2. Hasil Inventarisasi Bahan Diseminasi pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B03	Penyusunan Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia manusia	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Bahan/instrumen Diseminasi dan Penguatan 10 hak dasar manusia Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B03 - FINAL_DRAFT PEDOMAN DISEMINASI pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B04	1. Ujicoba Bahan/instrumen Diseminasi 2. Diseminasi Dan Penguatan HAM	90	Keterangan User : Daduk berupa Surat Keterangan yang di ttd Pjt. Direktur Keterangan Verifikator : Kegiatan belum bisa dilakukan dikarenakan beberapa alasan yang dijelaskan lewat Surat Keterangan dan ditandatangani oleh Pjt Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>B04 - SURAT KETERANGAN 10 HAK DASAR.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B05	1. Ujicoba Bahan/instrumen Penguatan HAM 2. Diseminasi Dan Penguatan HAM	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa: 1. Laporan Hasil Ujicoba Bahan/ instrumen Penguatan HAM 2. Laporan hasil Diseminasi Dan Penguatan HAM 3. Laporan Pemantauan dan Evaluasi pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B05 - Laporan Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM pdf</li> <li>B05 - Laporan Hasil Ujicoba Bahan Instrumen Diseminasi Penguatan HAM pdf</li> <li>B05 - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dan Penguatan HAM di Tingkat Provinsi pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B06	Diseminasi dan penguatan HAM	100	Keterangan User : Dakung Terpenuhi Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B06 - Laporan Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B07	Diseminasi Dan Penguatan HAM	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa: Laporan hasil diseminasi dan penguatan HAM Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B07 - Laporan Diseminasi dan Penguatan HAM.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B08	Diseminasi Dan Penguatan HAM	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa Laporan Diseminasi Dan Penguatan HAM Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B08 - Laporan Diseminasi dan Penguatan HAM.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B09	Rapat Perumusan kebijakan pemantauan, dan evaluasi diseminasi dan penguatan HAM	95	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Laporan Hasil Perumusan Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai namun belum melengkapi dokumentasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>B09 - LAPORAN HASIL PERUMUSAN.pdf</li> </ul>	Terverifikasi

T23-B10	Pemantauan dan Evaluasi pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa Laporan Pemantauan, Evaluasi, pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B10 - Laporan Pemantauan Evaluasi Pembinaan dan Penguatan HAM di Tingkat Provinsi -DISKUAT 10 HAK DASAR (1).pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B11	Pemantauan dan Evaluasi pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi	100	Keterangan User : Data Dukung terpenuhi berupa Laporan Pemantauan, Evaluasi, pembinaan dan penguatan HAM di tingkat provinsi Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B11 - LAPORAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGUATAN HAM DI TINGKAT PROVINSI.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B12	Penyusunan Evaluasi dan Laporan Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa Laporan Hasil Penyusunan Evaluasi dan Laporan Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B12 - LAPORAN HASIL PENYUSUNAN EVALUASI DAN LAPORAN HASIL DISEMINASI DAN PENGUATAN HAM.pdf</li> </ul>	Terverifikasi

### c. Capaian Tarja Diseminasi P2HAM Periode TW I sampai dengan TW IV

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T23-B01	Inventarisasi Unit Kerja yang telah melaksanakan tahap perancangan P2HAM	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Data rekapitulasi hasil Inventarisasi Unit Kerja yang telah melaksanakan tahap Pencanangan P2HAM Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B01- REKAPITULASI UNIT KERJA YANG TELAH MELAKSANAKAN TAHAP PENCANANGAN P2HAM.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B02	Persiapan pelaksanaan pendampingan dalam rangka tahap pembangunan pelayanan publik berbasis HAM	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Laporan persiapan pelaksanaan pendampingan Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B02 - Laporan Persiapan Pelaksanaan Pendampingan P2HAM 2023.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B03	Terlaksananya pendampingan dalam rangka tahap pembangunan pelayanan publik berbasis HAM	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Laporan hasil Pendampingan pelayanan publik berbasis HAM Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B03 - Laporan Hasil Pendampingan P2HAM.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B04	Pelaksanaan Persiapan tahapan Evaluasi pelayanan publik berbasis HAM	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa: Laporan Persiapan tahap Evaluasi pelayanan publik berbasis HAM Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B04 - Laporan Persiapan Tahap Evaluasi P2HAM.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B05	Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	90	Keterangan User : Daduk berupa surat keterangan yang di ttd PIt. Direktur Keterangan Verifikator : Kegiatan belum bisa dilakukan dikarenakan beberapa alasan yang dijelaskan lewat Surat Keterangan dan ditandatangani oleh PIt Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>B05 - SURAT KETERANGAN TARGET PENGUATAN P2HAM.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B06	Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	100	Keterangan User : Laporan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>B06 - Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan Diseminasi P2HAM di tingkat Provinsi.pdf</li> </ul>	Terverifikasi

T23-B07	Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa : Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B07 - Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan P2HAM di tingkat Provinsi.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B08	Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat Provinsi Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B08 - Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan P2HAM di tingkat Provinsi.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B09	Persiapan tahap penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa Laporan Persiapan tahap penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B09 - Laporan Persiapan Tahap Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B10	1. Pembentukan Tim Penilai P2HAM 2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengisian kriteria integritas	100	Keterangan User : Data Dukung terpenuhi berupa: 1. Surat Keputusan Tim Penilai P2HAM 2. Data terkait kriteria integritas Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B10 P2HAM - DATA TERKAIT KRITERIA INTEGRITAS (1).pdf</li> <li>B10 P2HAM - SK TIM PENILAI.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B11	Pelaksanaan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa 1. Laporan pelaksanaan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM 2. Rekapitulasi awal hasil penilaian Unit kerja P2HAM Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B11 - LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN P2HAM.pdf</li> <li>B11 - REKAP AWAL PENILAIAN P2HAM.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B12	Pelaksanaan pemberian predikat Unit Kerja P2HAM	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa: 1. Rekapitulasi akhir hasil penilaian unit kerja P2HAM 2. Surat Keputusan penetapan unit kerja P2HAM Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>B12 - REKAP AKHIR PENILAIAN P2HAM.pdf</li> <li>B12 - SK PENETAPAN P2HAM 2023.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi

#### d. Capaian Tarja Rekomendasi Puu Periode TW I sampai dengan TW IV

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T23-B01	1. Pengumpulan bahan rancangan peraturan perundang-undangan 2. Penyusunan Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM 3. Inventarisasi Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM.	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa Dokumen hasil pemetaan permasalahan Peraturan Perundang-undangan yang berpestif HAM (Matriks). Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daduk Tarja_Analisis SIPOI_B01 2023.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B02	1. Pengumpulan bahan rancangan peraturan perundang-undangan 2. Penyusunan Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM 3. Inventarisasi Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM.	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa Dokumen hasil pemetaan permasalahan Peraturan Perundang-undangan yang berpestif HAM (Matriks). Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daduk Tarja_Analisis SIPOI_B02 THN 2023.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi
T23-B03	1. Pengumpulan bahan rancangan peraturan perundang-undangan 2. Penyusunan Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM 3. Inventarisasi Pemetaan Permasalahan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM.	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa Dokumen hasil pemetaan permasalahan Peraturan Perundang-undangan yang berpestif HAM (Matriks). Keterangan Verifikator : Data dukung lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daduk Tarja B03 Analisis Rentan.pdf</li> </ul> <p>Tutup</p>	Terverifikasi

T23-B04	1. Pembentukan Tim Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang-undangan berspektif HAM 2. Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang-undangan berspektif HAM	95	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Dokumentasi Laporan koordinasi supervisi (surat koordinasi, Foto, Laporan koordinasi dan supervisi) Keterangan Verifikator : Data dukung kurang lengkap yakni SK TIM belum ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>LAPORAN TARJA ANALISIS APRIL 2023 pdf</li> <li>LAPORAN TARJA ANALISIS APRIL 2023 pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B05	1. Pembentukan Tim Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang-undangan berspektif HAM 2. Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang-undangan berspektif HAM	95	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Dokumentasi Laporan koordinasi supervisi (surat koordinasi, Foto, Laporan koordinasi dan supervisi) Keterangan Verifikator : Data dukung kurang lengkap yakni SK TIM belum ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>LAPORAN TARJA ANALISIS RENTAN MEI 2023 pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B06	1. Pembentukan Tim Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang-undangan berspektif HAM 2. Koordinasi supervisi K/L dan Pemda terkait Peraturan Perundang-undangan berspektif HAM	95	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Dokumentasi Laporan koordinasi supervisi (surat koordinasi, Foto, Laporan koordinasi dan supervisi) Keterangan Verifikator : Data dukung kurang lengkap yakni SK TIM belum ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>LAPORAN TARJA ANALISIS JUNI 2023 pdf rev2.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B07	1. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM 2. Rapat analisis dari perspektif HAM 3. Penyusunan rekomendasi analisis.	100	Keterangan User : Data dukung terpenuhi berupa Laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM (dokumen) Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>LAPORAN TARJA ANALISIS JULI 2023 pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B08	1. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM 2. Rapat analisis dari perspektif HAM 3. Penyusunan rekomendasi analisis.	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Laporan hasil analisis dan Laporan Rekomendasi Analisis peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Analisis dan Rekomendasi Bulan Agustus 2023.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B09	1. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM 2. Rapat analisis dari perspektif HAM 3. Penyusunan rekomendasi analisis.	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa Laporan hasil analisis dan Laporan Rekomendasi Analisis peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM (dokumen) Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Analisis dan Rekomendasi Bulan September 2023.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B10	1. Menyusun hasil rekomendasi peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM 2. Penyampaian Rekomendasi Analisis ke Pemda (Surat) 3. Koordinasi tindak lanjut hasil rekomendasi (Surat)	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa 1. Surat Penyampaian Rekomendasi ke Pemda; 2. Surat Tindak lanjut hasil rekomendasi dari Pemda. Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>LAPORAN PELAKSANAAN HASIL IDENTIFIKASI RANPERDA (Kepri).pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B11	1. Menyusun hasil rekomendasi peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM 2. Penyampaian Rekomendasi Analisis ke Pemda (Surat) 3. Koordinasi tindak lanjut hasil rekomendasi (Surat)	100	Keterangan User : Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa 1. Surat Penyampaian Rekomendasi ke Pemda; 2. Surat Tindak lanjut hasil rekomendasi dari Pemda. Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan Hasil Identifikasi Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM Kanwil Gorontalo.pdf</li> <li>Surat Rekomendasi Biro Hukum Pemprov Sulawesi Tenggara [1].pdf</li> <li>Tanggapan Biro Hukum Prov. Sultra.pdf</li> </ul>	Terverifikasi
T23-B12	1. Menyusun hasil rekomendasi peraturan Perundang-undangan yang berspektif HAM 2. Penyampaian Rekomendasi Analisis ke Pemda (Surat) 3. Koordinasi tindak lanjut hasil rekomendasi (Surat)	100	Keterangan User : Daduk terpenuhi berupa 1. Surat Penyampaian Rekomendasi ke Pemda; 2. Surat Tindak lanjut hasil rekomendasi dari Pemda. Keterangan Verifikator : Data dukung sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rekomendasi Biro Hukum Pemprov Sulawesi Tenggara.pdf</li> <li>2. Surat TL Hasil Rekom dari Pemda Sultra.pdf</li> </ul>	Terverifikasi

### 3. E-Monev Bappenas

Pemantauan dan pelaporan merupakan dua aktivitas berbeda yang saling terkait dan memainkan peranan penting dalam pengendalian pembangunan. Pemantauan dan pelaporan mendorong perencanaan yang berkualitas diimplementasikan dengan kualitas yang baik, sehingga intervensi yang direncanakan dan dilaksanakan dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan pelaporannya merupakan sebuah aksi kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan Renja-K/L dalam kerangka pengawalan pelaksanaan Renja-K/L, baik di level makro, meso dan mikro. Pemantauan dan pelaporannya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tidak saja kualitas implementasi rencana namun juga dalam kerangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan khususnya atas intervensi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

Aplikasi e-Monev sebagai media pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja-K/L merupakan instrumen yang tidak saja mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan, namun juga mendukung akuntabilitas intervensi pemerintah, baik Renja-K/L maupun RKP.

Direktorat Jenderal HAM sebagai Unit Eselon I yang memiliki 5 Unit Eselon II dibawahnya telah ikut berkontribusi dalam melaksanakan pemantauan dan pelaporan setiap kegiatannya baik pada level Komponen, RO Satuan Kerja dan RO Renja pada aplikasi e-Monev.

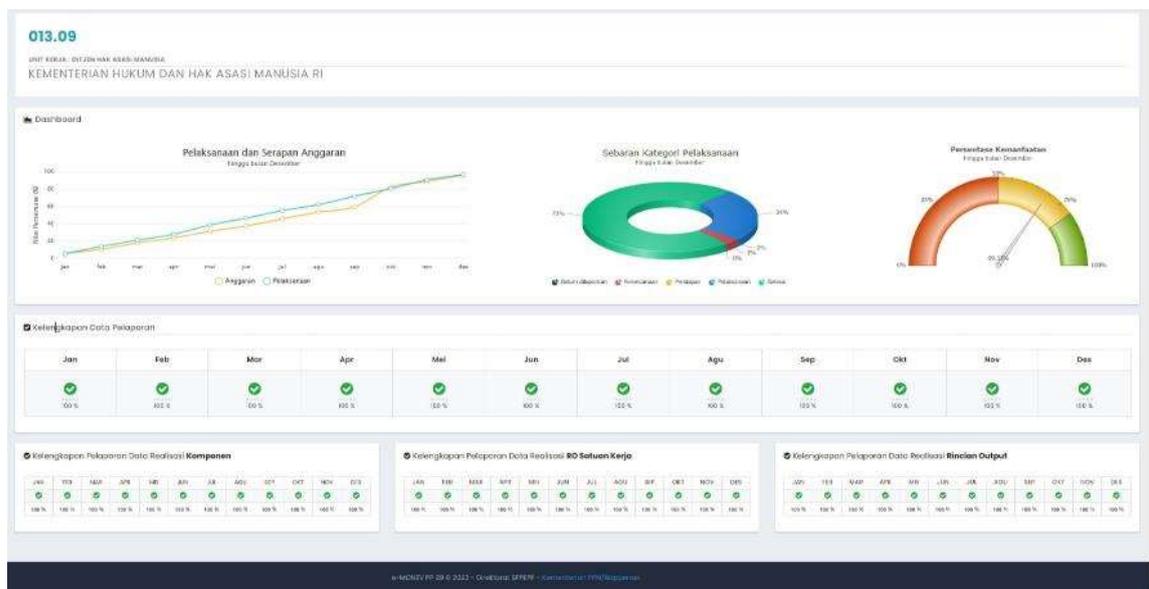
Bertempat di hotel Alana Sentul Bogor pada tanggal 8 Juni 2023 Direktorat Jenderal HAM telah melaksanakan *Workshop* e-Monev dengan Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dan Bagian Pemantauan Analisis dan Pelaporan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kemampuan SDM Direktorat Jenderal HAM untuk lebih memahami teknis dan substansi dari pemantauan dan pelaporan.

**Gambar III.4. Pelaksanaan kegiatan workshop e-Monev Bappenas di Hotel Alana Sentul**



Sumber gambar: Dokumentasi Kegiatan Workshop (PPL DJHAM)

Adapun capaian e-Monev Bappenas sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber data: Aplikasi e-Monev Kemen PPN/Bappenas

Sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2023 tingkat kepatuhan dalam penginputan pada aplikasi e-Monev Bappenas untuk level Komponen, RO Satker dan RO Renja pada Unit Eselon II sudah cukup baik. Ketaatan terkait penginputan tiap bulannya sudah berjalan sesuai dengan *deadline* pada aplikasi. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik dengan unit kerja. Sedangkan untuk Bidang HAM Kanwil Kemenkumham seluruh Kanwil sudah dengan tertib menginput pada aplikasi. Hal ini juga berkat koordinasi yang baik ke masing-masing operator Bidang HAM maupun PPL Kanwil supaya dapat mengisi capaian Komponen dan RO Satkernya.

#### 4. Kegiatan Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal HAM mengampu 2 (dua) Program Prioritas Nasional yaitu, Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM dan Penyusunan Indeks Pembangunan HAM.

Sampai dengan akhir periode tahun 2023 disampaikan persentase capaian Rincian Output Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RO PN RKP) pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.50. Persentase Capaian Per Triwulan Rencana Kerja Pemerintah Prioritas Nasional Direktorat Jenderal HAM Tahun 2023**

No	Program Prioritas	Persentase Capaian Per Triwulan			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM : Target : 75%	25%	50%	75%	100%
		Capaian pelaporan Aksi HAM periode TW I, adalah Pembentukan SK TIM, seleksi serta penetapan Tenaga Ahli RANHAM, penajaman capaian target Aksi HAM kepada K/L serta Propinsi dan Kab Kota, serta bimbingan teknis ke Provinsi dan Kab/Kota.	1. Bimbingan teknis ke Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Pelaporan aksi HAM K/L/D; 3. Verifikasi Aksi HAM K/L/D; 4. Monitoring dan evaluasi aksi HAM ke daerah; 5. Surat Capaian Hasil Verifikasi Aksi HAM K/L/D periode B04; 6. Laporan Implementasi	1. Pengembangan aplikasi SAPA HAM; 2. Melakukan Bimtek aplikasi SAPA HAM ke K/L/D; dan 3. Pelaporan Aksi HAM B08. Capaian antara B11 dari 30 KL yang memiliki tanggung jawab pelaksanaan Aksi HAM, terdapat 27 KL yang berpartisipasi (90%). Pada B11 terdapat	Seluruh tahapan di Output PN Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM terimplementasi 100%. Pelaporan. Rata-rata pelaporan Aksi HAM K/L/D Tahun 2023 adalah sebesar 81,72%

			<p>RANHAM Periode B04</p> <p>Capaian antara sampai dengan B04. Dari 30 KL yang memiliki tanggung jawab pelaksanaan Aksi HAM, terdapat 27 KL yang berpartisipasi (90%). Pada B04 terdapat 31 propinsi yang telah melaporkan Aksi HAM (91%) dan 3 Propinsi tidak melaporkan.</p>	<p>capaian rata-rata Aksi HAM B08.</p>	
2.	Penyusunan Indeks Pembangunan HAM	25%	50%	75%	100%
		<p>Telah tercapai penyempurnaan kerangka konsep dan variabel indeks pembangunan HAM Indonesia, serta telah terpilih 3 orang tenaga ahli untuk bidang HAM, Metodologi, dan Statistika</p>	<p>Telah tercapai penetapan kerangka konsep dan variabel indeks pembangunan HAM Indonesia, serta prioritas hak, elemen, indikator, identifikasi sumber dan kebutuhan data, dan metode pengumpulan data yang akan diukur dalam Indeks HAM, dengan didukung oleh penunjukan 5 tenaga ahli masing-masing dibidang HAM, Metodologi, Statistik, Sitem Informasi, dan Teknologi Informasi.</p>	<p>Status pelaksanaan penyusunan Indeks HAM sampai dengan TW III (Juli - September 2023) telah masuk dalam proses penyusunan dan pengumpulan data indeks HAM dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan 2x Rapat Konsultan Indeks HAM (akun 5853.PBD.001.052.H),</li> <li>2. Telah dilaksanakan 15 kegiatan Pengumpulan Data Indeks HAM melalui metode wawancara pakar (akun 5853.PBD.001.052.E), dan telah dilaksanakan 3x koordinasi pengumpulan data administratif Indeks HAM kepada K/L di tingkat pusat)</li> </ol>	<p>Secara keseluruhan output Indeks HAM telah tercapai 100% dari segi tahapan proses bisnis penyusunan Indeks HAM di tahun 2023 yang mengacu pada 2 sasaran yaitu Implementasi Rancangan Metadata dan Uji Coba Alat Ukur Indeks HAM.</p>

## 5. Kick Off Penanganan Pelanggaran HAM Berat

Kementerian Hukum dan HAM (Menteri Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal HAM) tergabung sebagai anggota Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023, serta mendapat instruksi khusus untuk memberikan prioritas layanan dalam memperoleh dokumen terkait hak kewarganegaraan kepada korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang berada di luar negeri. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Berdialog dengan eks-mahid di Swedia (Tom Iljas) melalui zoom pada 26 April 2023. Dalam dialog ini, Tom Iljas mengungkapkan harapan dan tanggapan atas Keppres No. 4 Tahun 2023 dan Inpres No. 2 Tahun 2023; dan
- ❖ Pada 27 Juni 2023, telah dilaksanakan Kick Off Penanganan Pelanggaran HAM Berat. Dalam Kick Off, Presiden menyerahkan secara simbolik layanan dokumen kewarganegaraan berupa Izin Tinggal Terbatas selama 1 tahun terhadap 2 korban yang saat ini berkewarganegaraan Rusia dan Ceko. Adapun pada 25 Juni 2023, Kantor Imigrasi Soekarno Hatta langsung memberikan e-Visa on Arrival Rp 0,- kepada 2 orang korban dan 1 orang ahli waris korban (anak korban), dan perekaman data untuk penerbitan Izin Tinggal Terbatas.

**Gambar III.5. Penyerahan simbolik pemulihan hak peristiwa pelanggaran HAM yang berat**



Sumber gambar: Facebook Ditjen HAM (Humas DJHAM)

## 6. Delegasi Pemerintah RI dalam *The 12th United Nations Forum on Business and Human Rights*

Direktur Jenderal HAM hadir di *The 12th United Nations Forum on Business and Human Rights* di Jenewa, pada tanggal 27-29 November 2023 mewakili Pemerintah Republik Indonesia sebagai delegasi.

Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong dan melindungi kebebasan mendasar terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kegiatan bisnis dan memastikan bahwa dunia usaha memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Beberapa capaian besar Indonesia dalam pengarusutamaan Bisnis dan HAM, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman hukum dan kebijakan bagi lembaga pemerintah, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan bisnis dan Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan tingkat regional.

Dukungan Pemerintah RI terhadap upaya-upaya kolektif untuk membentuk sebuah instrumen HAM global bagi korporasi dunia yang mengikat bertujuan bukan untuk melemahkan UMKM, mengingat pengembangan usaha yang dijalankan oleh individu atau UMKM, merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, terutama untuk negara-negara kurang berkembang. Forum tahun ini akan mendorong lebih banyak negara dan pelaku usaha di seluruh dunia untuk mengadopsi UNGP dan lebih memastikan implementasi yang efektif di lapangan demi kepentingan seluruh rakyat.

### **Gambar III.6. Delegasi Pemerintah RI dalam *The 12th United Nations Forum on Business and Human Rights***



Sumber gambar: Humas DJHAM (Protokoler)

## 7. Pemberian Layanan Keimigrasian bagi korban dugaan pelanggaran HAM Berat di Luar Negeri

Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya melaksanakan kunjungan ke Belanda dan Ceko pada tanggal 24 s.d. 30 Agustus 2023. Kunjungan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan dialog bersama eks-mahasiswa ikatan dinas Indonesia di luar negeri yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu serta pemberian layanan keimigrasian berupa e-Visa Rp 0,-. e-Visa diberikan kepada 3 (tiga) orang korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu dengan rincian 1 (satu) orang diberikan di Belanda, a.n. Sri Budiarti Tunruang dan 2 (dua) orang diberikan di Ceko, a.n. Siswartono Sarodjo dan Kansilova Wahjuni.

Pemberian layanan Keimigrasian terus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM pasca dilaksanakannya kunjungan tersebut dan berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023. Hingga saat ini jumlah layanan keimigrasian berupa e-Visa Rp 0,- telah diberikan kepada 19 (sembilan) belas orang dengan rincian, 18 (delapan belas) orang korban dan 1 (satu) ahli waris korban.

**Gambar III.7. Pemberian Layanan Keimigrasian bagi korban dugaan pelanggaran HAM Berat di Luar Negeri**



Sumber gambar: Humas DJHAM (Protokolier)

## **8. Kolaborasi Pelaksanaan Komunitas Pemuda Pelajar Pecinta HAM (KOPPETA HAM) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

Sesungguhnya, setiap negara hukum adalah negara yang menghormati hak asasi manusia. Penghormatan hak asasi manusia tersebut, salah satunya ditandai dengan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual. Hubungan antara kekayaan intelektual dan hak asasi manusia mempunyai kaitan erat, Kekayaan Intelektual adalah meta teori dari Hak Asasi Manusia. Sementara hak asasi manusia adalah meta teori dari negara, sehingga hubungan antara kekayaan intelektual dan hak asasi manusia menjadi sebuah kebebasan yang berwujud nyata dari kemampuan manusia dalam bentuk ciptaan atau hasil penemuan. Hasil ciptaan atau penemuan tersebut melekat pada diri pencipta yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, agar masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan nilai-nilai hak asasi manusia melalui penyebaran informasi. Penyebaran informasi tersebut dilakukan dengan memberikan edukasi terkait kekayaan intelektual dan nilai-nilai hak asasi manusia dengan melakukan diseminasi pemahaman kekayaan intelektual dan hak asasi manusia sejak dini, khususnya bagi para pelajar SMA/Sederajat dan Komunitas Pemuda Pelajar Pecinta HAM (KOPPETA). Lebih lanjut, KOPPETA HAM merupakan gerakan sosial komunitas pelajar pemuda pecinta HAM yang mempunyai tanggung jawab untuk menyadarkan generasi muda dalam menumbuhkan semangat bercreta karya dan berinovasi yang berkualitas dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

Kegiatan ini adalah media pembelajaran untuk memberikan pemahaman Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia bagi para pelajar SMA/Sederajat betapa pentingnya perlindungan dan menghargai kekayaan intelektual serta menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Selayaknya, kegiatan ini memberikan kualitas pengajaran yang lebih optimal kepada pelajar SMA/Sederajat mengenai pentingnya melindungi kekayaan intelektual dan HAM tersebut. Generasi muda diharapkan mampu menciptakan dan menghasilkan karya inovasi yang lebih berkualitas dan kuantitas dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Hal lain, dengan kehadiran KOPPETA HAM (Komunitas Pemuda Pelajar Pecinta HAM) dalam kegiatan ini dan telah membacakan deklarasi Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia

tersebut diharapkan menjadi *Agent Of Change* bagi lingkungan sekitar dalam kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui kegiatan ini yang menghadirkan pelajar SMA/Sederajat termasuk KOPPETA HAM diharapkan terus memotivasi generasi selanjutnya.

**Gambar III.8. Kegiatan Diseminasi Pemahaman Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia bagi pelajar SMA/Sederajat tahun 2023**



Sumber gambar: Laporan Diseminasi Koppeta Tahun 2023

## **9. Pelatihan Mediator dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Bagi Direktorat Jenderal HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM**

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) adalah unit yang strategis dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai unit Eselon II di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Yankomas memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan komunikasi masyarakat. Bentuk konkret dari pelaksanaan tugas tersebut adalah penanganan permasalahan hak asasi manusia yang diadukan oleh masyarakat dan permasalahan hak asasi manusia aktual yang diperoleh dari media cetak maupun media daring.

Selama ini, metode tindak lanjut yang digunakan Petugas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM adalah melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi dan klarifikasi atas kasus dugaan pelanggaran HAM yang telah dianalisis sebelumnya oleh Petugas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Mekanisme ini adalah mekanisme satu arah, yakni Petugas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM merespons hasil koordinasi dari Pemangku kepentingan (instansi penanggung jawab), kemudian Petugas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM menyampaikan hasil dari koordinasi tersebut kepada Penyampai Komunikasi atau masyarakat terdampak. Dengan kata lain, Penyampai Komunikasi atau masyarakat terdampak hanya menunggu respons dari Petugas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Namun demikian, sering kali Penyampai Komunikasi atau masyarakat terdampak tidak puas dengan hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Petugas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, sehingga acap kali kasus yang ditangani belum memperoleh penyelesaian secara optimal, dalam arti kata tidak memperoleh *win win solution*.

Mengingat hal tersebut, Direktorat Jenderal HAM menganggap perlu untuk menerapkan metode lain dalam rangka mendorong penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM, melalui metode mediasi. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat melakukan upaya perdamaian antara pelapor dan/atau pihak terkait.

Mengingat Peraturan Menteri ini baru ditetapkan pada akhir 2022, kondisi petugas di Direktorat Jenderal HAM dan Kantor Wilayah masih belum memahami tentang upaya perdamaian dalam bentuk mediasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja petugas dalam menangani dugaan pelanggaran HAM melalui upaya perdamaian.

Sebagaimana diketahui mediasi adalah satu dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (APS)*. Dengan permasalahan terkait dengan lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang banyak menyita waktu dan biaya, setidaknya dapat diminimalisir. Harapannya dengan dilakukannya mediasi dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang ditangani Direktorat Yankomas, dapat dengan cepat dan tepat terselesaikan, sebagaimana visi Kementerian Hukum dan HAM yakni Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

**Gambar III.9. Pelatihan Mediator dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Bagi Direktorat Jenderal HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM**



Sumber gambar: Laporan Pelatihan Sertifikasi Mediator Mahkamah Agung



**DJHAM**

# **BAB IV PENUTUP**

**Kesimpulan  
Saran**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**



**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**

## BAB IV PENUTUP

### IV.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tahun 2023 menunjukkan bahwa telah semua indikator kinerja yang diukur dan ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah mencapai target. Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan dari capaian kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia selama tahun 2023:

- ❖ Capaian kinerja sasaran strategis, diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja strategis, yaitu capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat dan Daerah, dan sudah diperoleh capaiannya untuk Aksi HAM Pusat sebesar 92,28% dan untuk Aksi HAM Daerah sebesar 76,44%.
- ❖ Capaian kinerja sasaran program, diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja program yaitu Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dan instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) telah tercapai melebihi target. Untuk KKP HAM diperoleh realisasi sebesar 52%, untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM diperoleh realisasi sebesar 63,8%, dan untuk P2HAM diperoleh realisasi sebesar 82,18%.
- ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan, diukur berdasarkan 12 (dua belas) sasaran kegiatan yang terbagi ke dalam 16 (enam belas) indikator kinerja kegiatan, telah semuanya diperoleh nilai dan mencapai target yang ditetapkan.
- ❖ Capaian kinerja lainnya yang berhasil dicapai Direktorat Jenderal HAM selama tahun 2023 yaitu:
  - ✓ Direktorat Jenderal HAM telah melaksanakan 2 Program Prioritas Nasional yaitu Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM dan Penyusunan Indeks Pembangunan HAM.
  - ✓ Direktorat Jenderal HAM telah melaksanakan Kick Off Penanganan Pelanggaran HAM Berat yang dihadiri oleh Presiden sekaligus menyerahkan secara simbolik layanan dokumen kewarganegaraan berupa Izin Tinggal Terbatas.

- ✓ Direktorat Jenderal HAM telah mengeluarkan Surat Rekomendasi terkait Pemenuhan HAK Korban dugaan PHB yang berada di luar negeri (eks mahid) untuk menerima layanan prioritas keimigrasian berupa visa tarif 0 (nol) rupiah dan pemberian izin tinggal terbatas.
  - ✓ Direktorat Jenderal HAM hadir *The 12th United Nations Forum on Business and Human Rights* di Jenewa, pada tanggal 27-29 November 2023 mewakili Pemerintah Republik Indonesia sebagai delegasi.
  - ✓ Direktorat Jenderal HAM berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan KOPPETA HAM (Komunitas Pemuda Pelajar Pecinta HAM) terkait pentingnya perlindungan dan menghargai kekayaan intelektual serta menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.
  - ✓ Direktorat Jenderal HAM berkolaborasi dengan Mahkamah Agung melaksanakan kegiatan Pelatihan Mediator dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Bagi Direktorat Jenderal HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- ❖ Selama tahun 2023, Direktorat Jenderal HAM mengelola anggaran pagu awal sebesar Rp 41.980.498.000,- kemudian berdasarkan Petikan DIPA Revisi ke 05 tanggal 26 Juni 2023 dengan nomor seri DS:8449-5409-3389-9390, Direktorat Jenderal HAM mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja sarana dan prasarana pada program Dukungan Manajemen di Direktorat Jenderal HAM sebesar Rp 17.956.046.000,- dan mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kembali berdasarkan Petikan DIPA Revisi ke 08 tanggal 13 Oktober 2023 dengan nomor seri DS:7897-3585-6052-6505 sebesar Rp. 1.267.737.000,- sehingga pagu Ditjen HAM Tahun 2023 sebesar Rp 61.204.281.000,-. Dan total pagu termasuk Bidang HAM Kantor Wilayah adalah sebesar Rp. 69.836.022.000,-. Sampai dengan tanggal 08 Januari 2024 terealisasi sebesar Rp 68.391.151.860,- atau sebesar 97,93%.

## IV.2. Saran

Untuk meningkatkan kinerja organisasi yang konsisten dan berkesinambungan pada masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- ❖ Menyiapkan aplikasi Monev SAPAHAM yang akan memfasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaporan Aksi HAM tahun 2023 dan tahun yang akan datang menggantikan aplikasi Monev Kantor Staf Presiden;
- ❖ Meningkatkan jumlah partisipasi dan kualitas pelaporan aksi HAM, perlu komitmen dari pimpinan K/L/D dan pemahaman bahwa RANHAM bukanlah sekedar formalitas pembangunan HAM, namun dokumen politik HAM yang menjadi tolok ukur terhadap komitmen penyelenggara kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM;
- ❖ Perlunya sosialisasi dan bimbingan teknis secara masif kepada Kementerian dan Lembaga terkait Materi muatan HAM dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengintegrasian muatan HAM dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat;
- ❖ Perlunya sinergitas antar unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal HAM guna merumuskan suatu kebijakan tentang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- ❖ Perlunya memperluas lingkup instansi pemerintah yang menindaklanjuti pelayanan publik berbasis HAM yakni Kementerian/ Lembaga diluar Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia.



**DJHAM**

# LAMPIRAN- LAMPIRAN

**Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan  
Perjanjian Kinerja Tahun yang akan  
datang  
Lain-lain**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**



**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Dhahana Putra  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly  
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

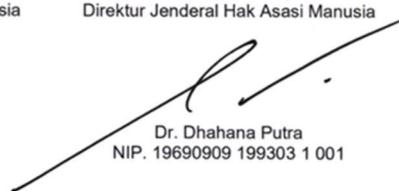
Jakarta, April 2023

Pihak Kedua,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra  
NIP. 19690909 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	75,0% 45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	25% 50% 75%

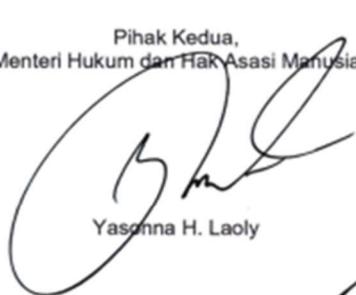
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	1. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%
2.	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	1. Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	100%
3.	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	1. Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	100%
4.	Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	1. Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	70%
5.	Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Tersedianya Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1 Dokumen
7.	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
8.	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1. Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1 Rekomendasi
9.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	109 Instansi Pemerintah
		2. jumlah kab/kota peduli HAM	57 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	33 Instansi Pemerintah
10.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	99 Rekomendasi
11.	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan perspektif HAM yang ditindaklanjuti	1. Persentase Rekomendasi kebijakan perspektif HAM yang ditindaklanjuti	90%
12.	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		2. Jumlah Layanan Internal	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Kegiatan	Anggaran
	<b>Program Pemajuan dan Penegakan HAM</b>	<b>Rp. 18.123.254.000,-</b>
1.	Diseminasi dan Penguatan HAM	Rp. 1.200.433.000,-
2.	Pelayanan Informasi HAM	Rp. 900.035.000,-
3.	Kerja Sama HAM	Rp. 2.408.886.000,-
4.	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Rp. 2.405.917.000,-
5.	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 8.631.741.000,-
6.	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM	Rp. 2.576.242.000,-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 32.488.985.000,-</b>
1.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Rp. 32.488.985.000,-

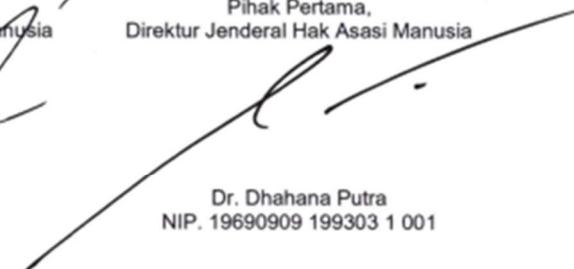
Jakarta, April 2023

Pihak Kedua,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra  
NIP. 19690909 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

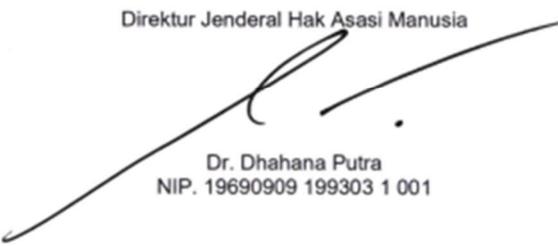
Nama : Dr. Dhahana Putra  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, April 2023

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Dr. Dhahana Putra  
NIP. 19690909 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhahana Putra  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly  
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	30 %
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50 %
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	100 %
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	95 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	95 %
		3. Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	8 %
		4. Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen HAM	1 Layanan

No.	Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pemajuan dan Penegakan HAM</b>		<b>Rp. 21.662.728.000,-</b>
1.	Diseminasi dan Penguatan HAM	Rp. 624.154.000,-
2.	Pelayanan Informasi HAM	Rp. 2.350.189.000,-
3.	Kerja Sama HAM	Rp. 3.102.757.000,-
4.	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Rp. 1.564.727.000,-
5.	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM	Rp. 3.203.154.000,-
6.	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 10.817.747.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>Rp. 42.148.126.000,-</b>
1.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Rp. 42.148.126.000,-

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2023

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001

